



BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



2024



# CASCADING KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	5
1.4. Ruang Lingkup.....	5
1.5. Sistematika.....	5
<b>POHON KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI.....</b>	<b>6</b>
2.1. Tahap I: Menentukan outcome/hasil yang akan dijabarkan.....	6
2.2. Tahap II: Menentukan Critical Success Factors (CSF).....	7
2.3. Menguraikan CSF Hingga Level Operasional.....	9
2.4. Tahap 4a: Menyusun Indikator Kinerja.....	10
2.5. Tahap 4b: Menyusun Pohon Kinerja.....	12
2.6. Tahap 5: Menerjemahkan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan.....	13
<b>PENUTUP.....</b>	<b>28</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat tercapainya visi Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan SAKIP di instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Melalui penerapan SAKIP, kinerja instansi pemerintah didorong lebih akuntabel karena dapat dinilai secara objektif berdasarkan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan SAKIP juga dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan KKN. Dengan adanya hubungan yang sinergis antara reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja, diharapkan instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat/pengguna layanan.

Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP pada instansi pemerintah dievaluasi dan diukur secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri). Evaluasi SAKIP dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menetapkan bobot komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri atas, Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%). Evaluasi AKIP menjadi instrumen penting untuk mengukur pencapaian tujuan pemerintahan, hasil kerja instansi pemerintah maupun dampaknya bagi masyarakat.

Perencanaan kinerja merupakan fondasi dan komponen penting yang dinilai dalam evaluasi AKIP. Penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar “baik” dengan kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, time-bound*);
2. Dokumen disusun berdasarkan penjenjangan kinerja (*cascading*) dengan model logis (*logic model*) di setiap tingkatan jabatan, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Penjenjangan kinerja yang merupakan salah satu komponen perencanaan kinerja disusun berdasarkan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Komponen ini mencakup penetapan sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target pencapaian yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja di instansi pemerintah. Dengan penjenjangan kinerja, setiap unit kerja akan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai hasil dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini juga diharapkan mendorong keterkaitan yang lebih kuat antara kinerja individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem akuntabilitas kinerja dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Dengan demikian, keterkaitan antara SAKIP dan penjenjangan kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 menjadi pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang lebih akuntabel, responsif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai salah satu lembaga negara turut berkomitmen mendorong reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan tugas dan fungsi DPR berjalan secara optimal. Birokrasi yang efisien dan responsif akan membantu meningkatkan produktivitas kerja anggota DPR, mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan meningkatkan pelayanan kepada anggota dewan dan masyarakat. DPR RI juga telah menerapkan SAKIP dan evaluasi AKIP dalam rangka mendukung pencapaian program reformasi birokrasi di lingkungan DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung turut melakukan penyesuaian pada kerangka berpikir dalam penyusunan standar kinerja dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021. PermenpanRB tersebut menekankan pada penggunaan model logis (*logic model*) dalam menyusun standar kinerja organisasi. Indikator kinerja yang disusun harus bersifat “SMART” dan mampu mendukung pencapaian hasil (*outcome*) yang ingin dicapai organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor (CSF)*). Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 memberikan penekanan agar seluruh instansi pemerintah menyusun pohon kinerja organisasi dan menerjemahkan pohon kinerja tersebut ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi, unit kerja, hingga individu aparatur. Penjenjangan Kinerja untuk instansi pemerintah diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh strategi, program, dan kegiatan organisasi berasaskan pada model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang jelas menunjukkan hubungan sebab akibat.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penyusunan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja adalah agar terdapat standar kinerja di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedua hal tersebut penting karena terdapat sasaran strategis/program/kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja, alokasi anggaran, hingga pohon kinerja organisasi. Penyusunan standar kinerja tersebut dilakukan dengan berpedoman pada penyusunan penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB melalui PermenpanRB nomor 89 Tahun 2021.

Manfaat dari penyusunan standar kinerja Setjen DPR RI ini adalah sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja dan individu pada setiap tingkatan jabatan di lingkup Setjen DPR RI dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan SAKIP dan reformasi birokrasi di lingkup Setjen DPR RI. Di samping itu, penyusunan standar kinerja Setjen DPR RI ini juga akan menjadi acuan dalam pengukuran kinerja organisasi.

## **1.4. Ruang Lingkup**

Pohon Kinerja organisasi yang disusun adalah di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tahun 2023-2024 mulai dari tingkat Eselon I hingga Eselon II. Sekretariat Jenderal DPR RI tengah mengkaji dan berupaya agar penyusunan pohon kinerja bisa dilakukan hingga level individu..

## **1.5. Sistematika**

BAB I: Pendahuluan

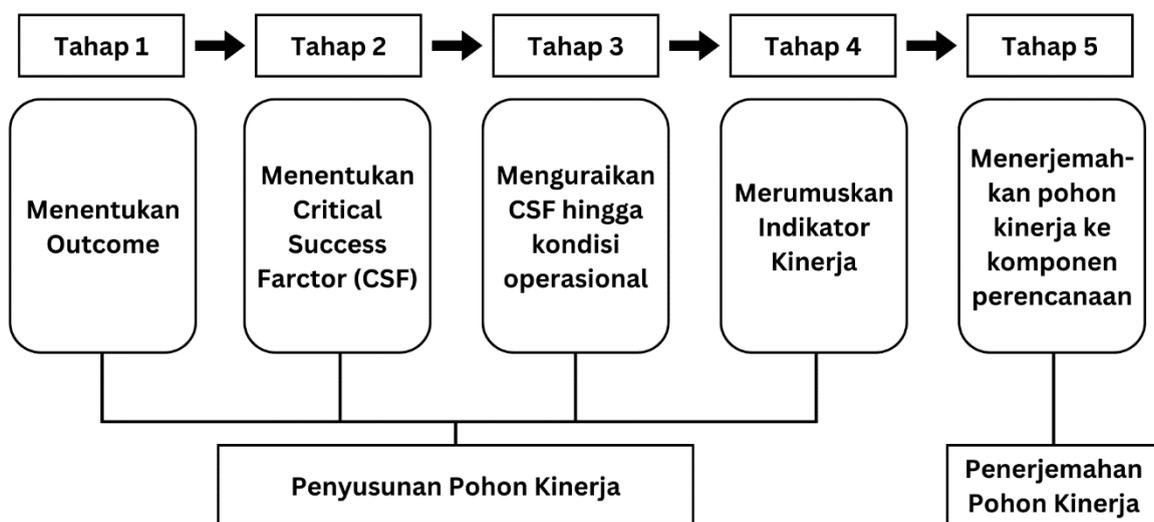
BAB II: Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

BAB III: Penutup

## BAB II

### POHON KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penyusunan pohon kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pakar dan pemangku kepentingan untuk menentukan dan menyepakati poin-poin penting dalam menyusun pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja Setjen DPR RI dilakukan dengan menerapkan prinsip model logis/*logic model* yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: menentukan *outcome*/hasil kerja, menentukan CSF, menguraikan CSF, merumuskan indikator kinerja, dan menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Lebih jelas terkait kelima tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

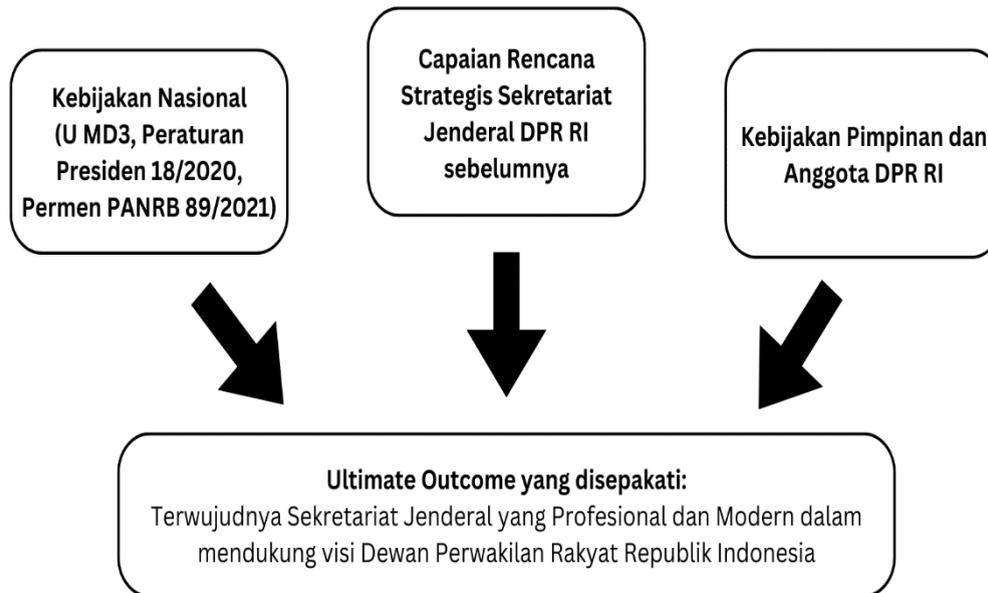


Gambar 1. Tahapan Penjenjangan Kinerja

#### 2.1. Tahap I: Menentukan *outcome*/hasil yang akan dijabarkan

Tahapan pertama dalam menyusun pohon kinerja Setjen DPR RI adalah menentukan *outcome*/hasil yang ingin dicapai. Pada tahapan ini dilakukan serangkaian FGD dengan para pakar dan pemangku kepentingan untuk menentukan keputusan strategis organisasi. Pada tahapan ini para pimpinan organisasi berdiskusi dan menyepakati *outcome*/hasil yang akan dihasilkan oleh organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

*Outcome*/hasil yang diharapkan oleh Setjen DPR RI disusun dengan mempertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu: Kebijakan nasional (UU MD3, Perpres 18/2020, Permen PANRB 89/2021, dll), capaian renstra tahun sebelumnya, dan kebijakan pimpinan dan anggota DPR RI. Berikut adalah kesepakatan dari para pimpinan organisasi terkait *outcome*/hasil yang akan dihasilkan oleh Setjen DPR RI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan:

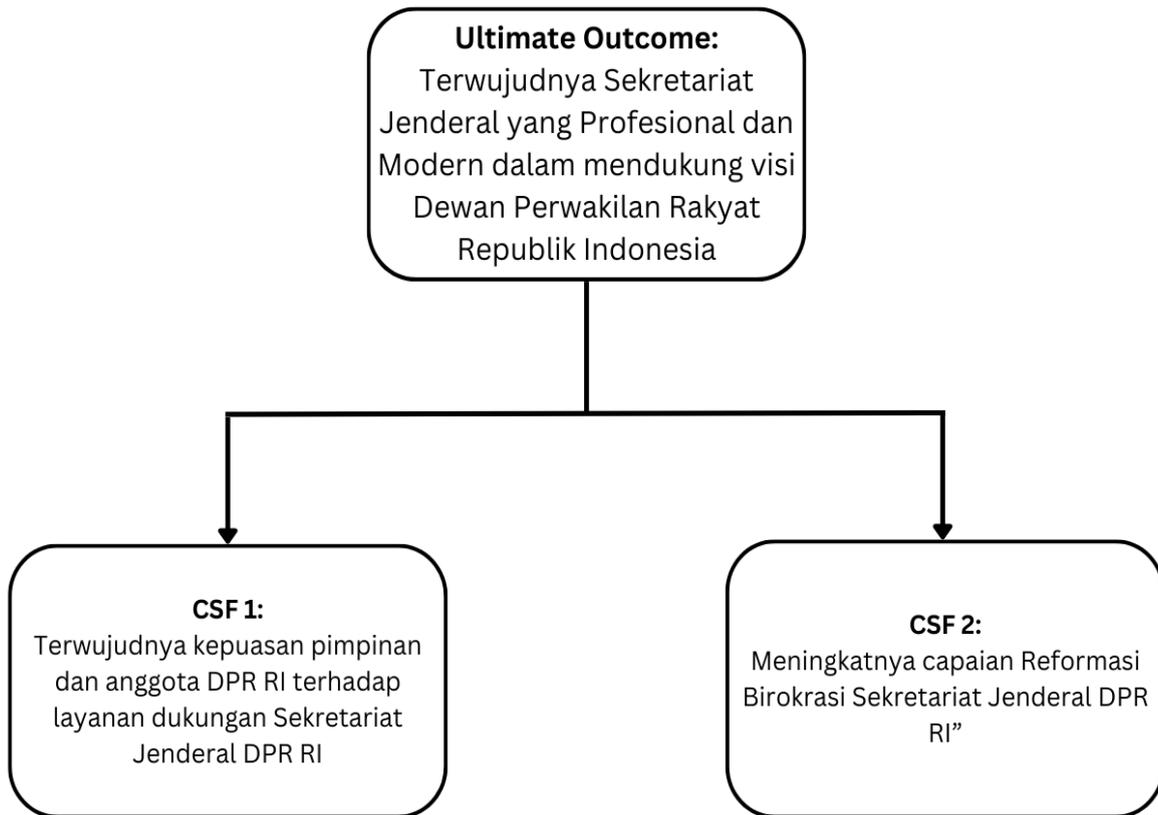


**Gambar 2. Outcome/hasil yang diharapkan Setjen DPR RI**

Setjen DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Dengan demikian, Setjen DPR RI merupakan unit yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan internal kesekretariatan kepada anggota dewan, pelaksanaan tata kelola organisasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, *ultimate outcome* Setjen DPR RI adalah “**Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**”.

## 2.2. Tahap II: Menentukan *Critical Success Factors (CSF)*

Tahapan kedua dalam menyusun pohon kinerja Setjen DPR RI adalah mengidentifikasi dan menentukan CSF. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor kunci apa saja yang sangat berpengaruh dalam mendukung pencapaian *outcome/hasil* organisasi yang telah ditetapkan pada tahapan sebelumnya. Proses identifikasi CSF ini juga dilakukan melalui serangkaian FGD atau diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan, baik dari pejabat penentu keputusan, pejabat teknis yang sangat memahami kondisi di lapangan, dan narasumber yang ahli di bidangnya. Proses identifikasi CSF ini juga mengadopsi beberapa teori relevan terkait *outcome/hasil* yang ingin dicapai. Keluaran dari tahap dua ini adalah CSF yang telah sama-sama disepakati oleh berbagai pejabat pemangku kepentingan. Berikut adalah CSF yang telah disepakati pada tahapan kedua ini:

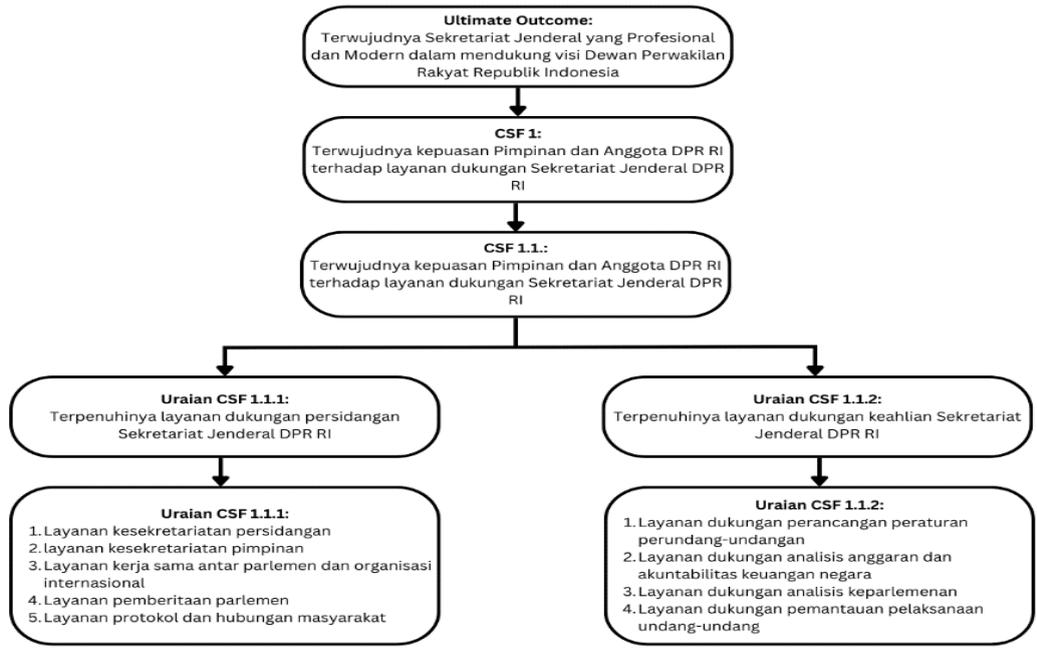


**Gambar 3. CSF Setjen DPR RI**

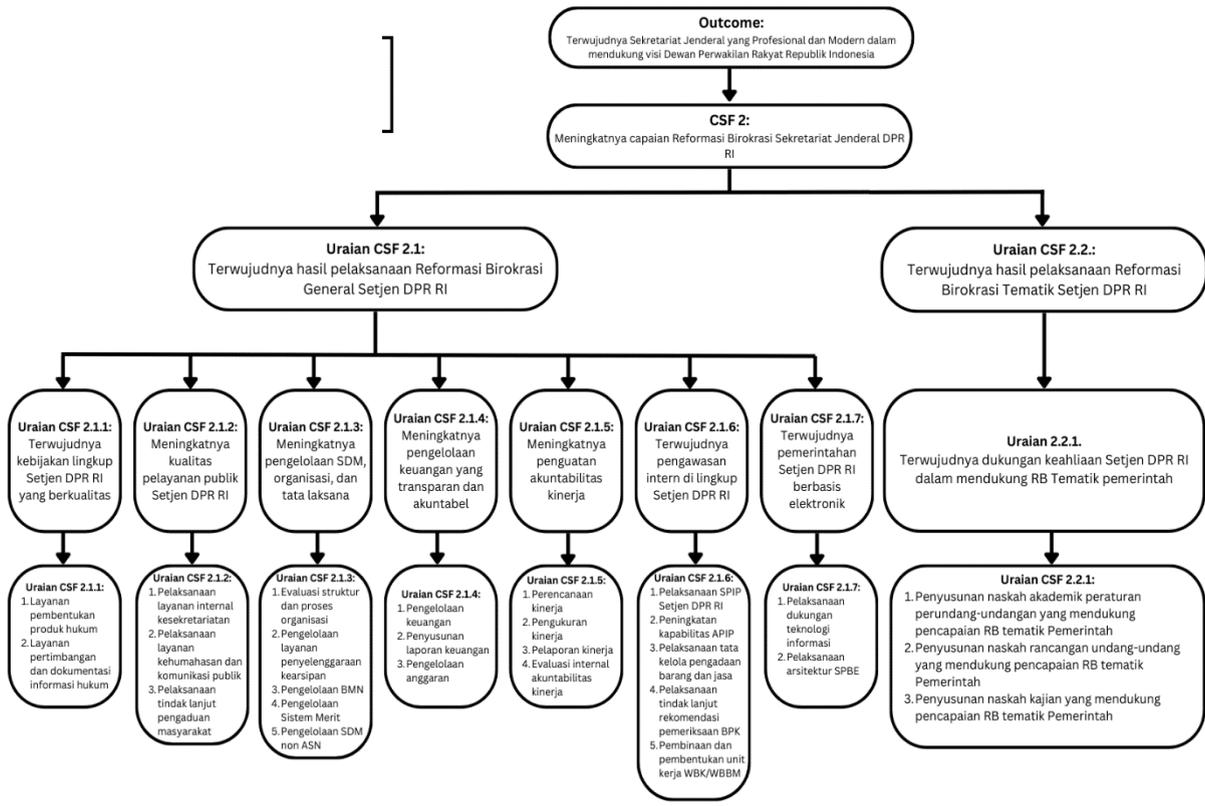
Gambar di atas menunjukkan terdapat 2 (dua) CSF yang merupakan faktor kunci keberhasilan dari pencapaian *outcome* “**Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**”. Kedua CSF tersebut, yaitu: terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan meningkatnya capaian RB Setjen DPR RI.

### **2.3. Menguraikan CSF Hingga Level Operasional**

Tahapan ketiga dalam penyusunan pohon kinerja Setjen DPR RI adalah menguraikan CSF yang telah diidentifikasi dan ditetapkan pada tahapan sebelumnya kepada kondisi antara hingga kondisi paling teknis/operasional. Sama seperti pada tahapan identifikasi dan menentukan CSF, tahapan ini juga dilakukan dengan serangkaian FGD atau diskusi dengan para pemangku kepentingan dan ahli di bidangnya. Tahapan ini juga mengadopsi teori-teori yang relevan dengan CSF yang kemudian dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan. Hasil akhir dari tahapan ketiga ini adalah *outcome* antara untuk mencapai *outcome* organisasi dan CSF turunan (hingga level teknis/operasional) dari CSF yang telah ditetapkan pada tahapan kedua. Berikut adalah uraian CSF hingga ke level operasional:



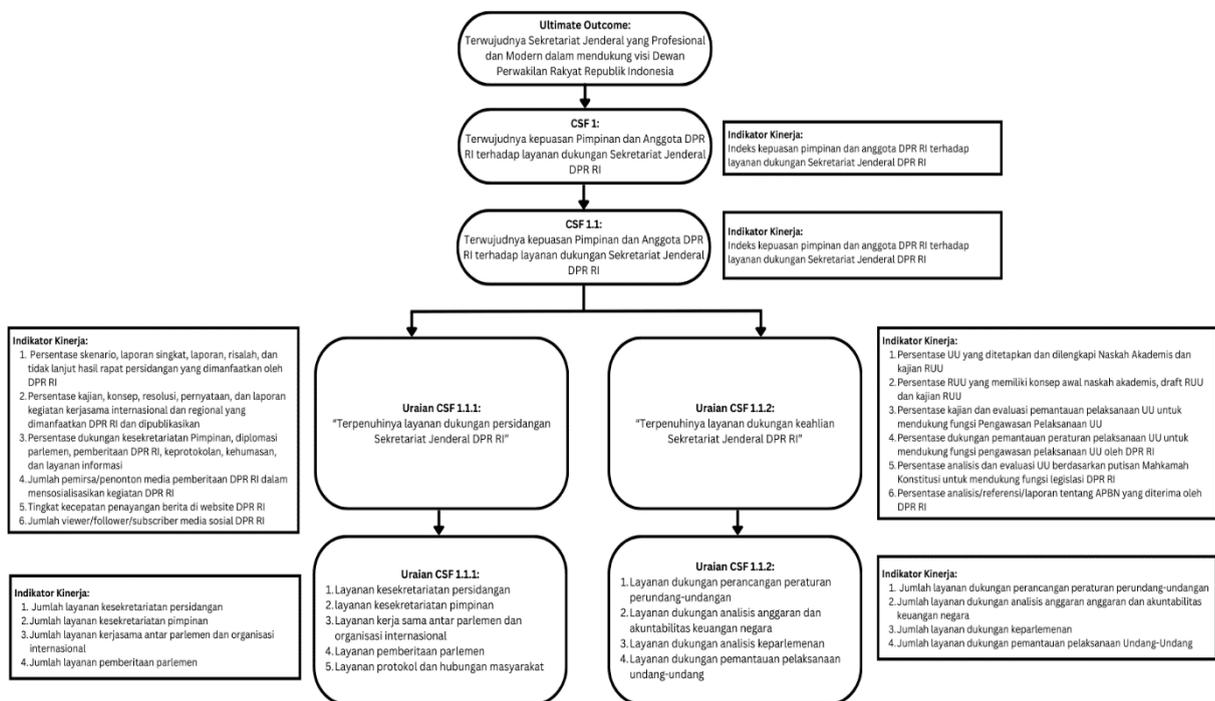
Gambar 4. Uraian CSF 1



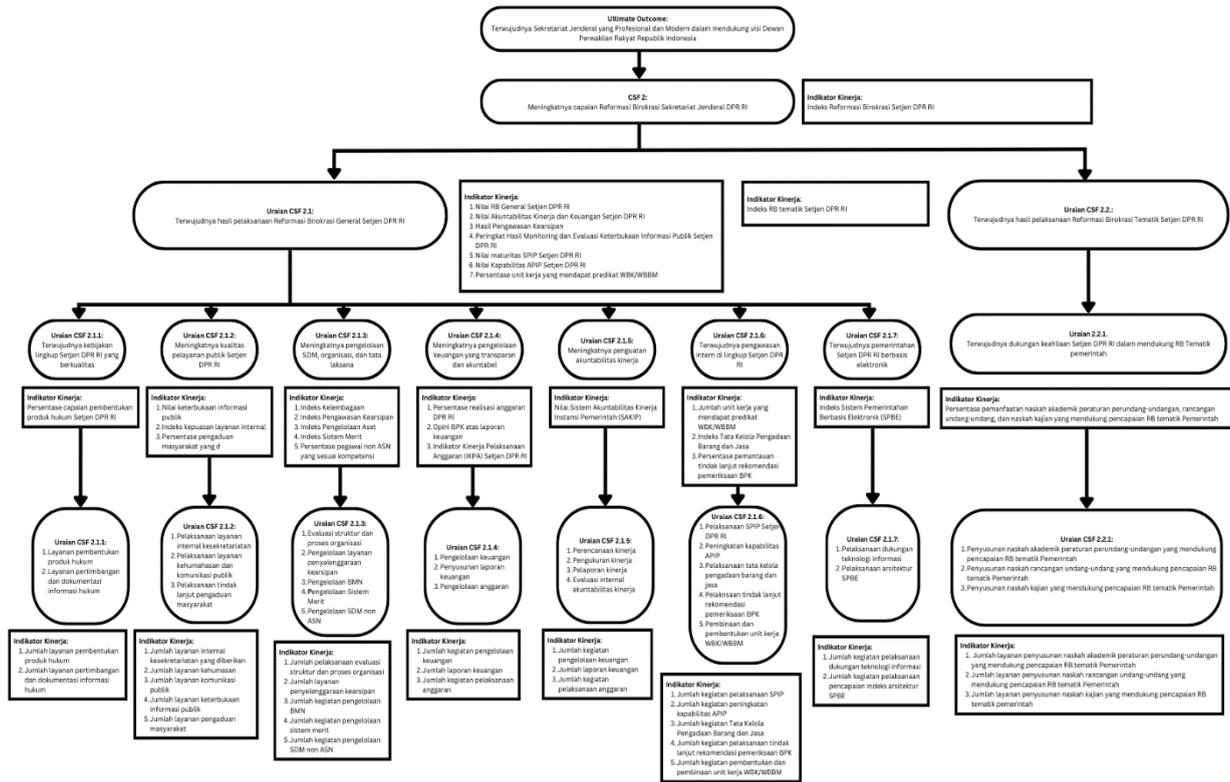
Gambar 5. Uraian CSF 2

## 2.4. Tahap 4a: Menyusun Indikator Kinerja

Tahapan keempat dalam penyusunan pohon kinerja Setjen DPR RI adalah menyusun indikator kinerja. Penyusunan indikator kinerja Setjen DPR RI berpedoman pada *outcome / outcome* antara dan CSF yang telah diuraikan hingga ke level operasional yang telah dihasilkan pada tahapan-tahapan sebelumnya (tahapan 1-3). *Outcome / outcome* antara beserta CSF tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART, yaitu: *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timebound*. Sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya, penyusunan indikator kinerja ini juga dilakukan melalui serangkaian FGD dengan para pemangku kepentingan di dalam organisasi. Berikut adalah indikator kinerja Setjen DPR RI berdasarkan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan.



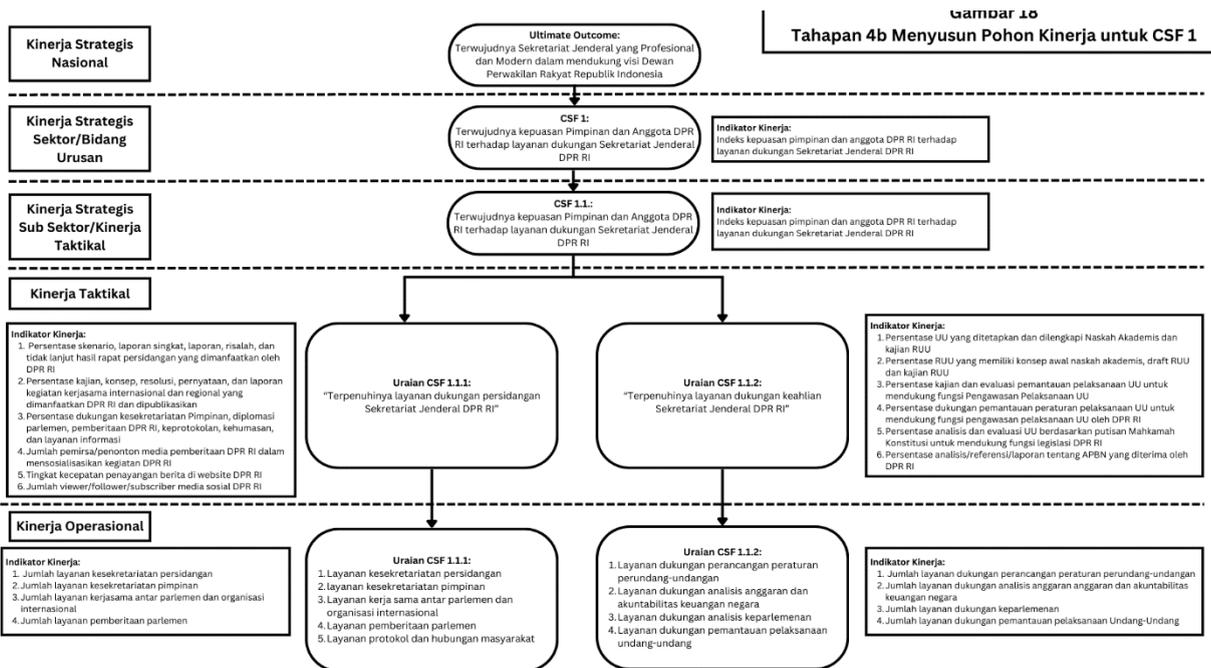
Gambar 6. Indikator kinerja untuk CSF 1



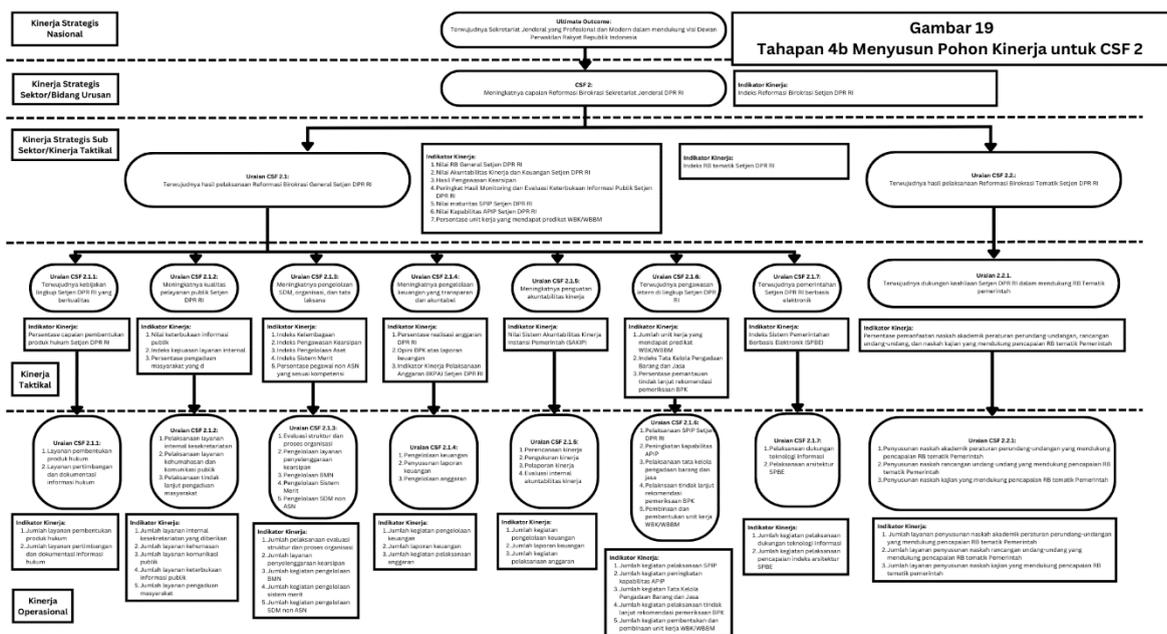
**Gambar 7. Indikator kinerja CSF**

## 2.5. Tahap 4b: Menyusun Pohon Kinerja

Setelah menyusun dan menetapkan indikator kinerja Setjen DPR RI, langkah berikutnya adalah menggambarkan pohon kinerja Setjen DPR RI ke dalam bentuk bagan. Dengan demikian, akan terlihat hubungan sebab akibat dari setiap indikator kinerja. Indikator kinerja yang berada pada tingkat bawah, harus mendukung pencapaian dari indikator kinerja yang berada di tingkat atasnya, dan seterusnya hingga indikator *outcome/outcome* antara. Berikut adalah gambar pohon kinerja Setjen DPR RI yang telah ditetapkan dan disepakati:



**Gambar 8 . Pohon Kinerja Setjen DPR RI untuk CSF 1**



**Gambar 9. Pohon Kinerja Setjen DPR RI untuk CSF 2**

## 2.6. Tahap 5: Menerjemahkan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan

Tahapan terakhir dalam penyusunan pohon kinerja Setjen DPR RI adalah menerjemahkan pohon kinerja yang telah disusun pada tahapan sebelumnya ke dalam dokumen perencanaan organisasi. Pada tahapan ini variabel-variabel kinerja serta indikator kinerja yang telah disusun dalam pohon kinerja kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu dengan menentukan variabel mana yang

akan menjadi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Berikut adalah hasil penerjemahan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan. Berikut adalah Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Dokumen Perencanaan.

### **CSF 1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>	<b>Level Kinerja</b>	<b>Target 2024</b>
1	SS.1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	IKSS 1.1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPR RI atas layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekjen	3,74

### **CSF 1.1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>	<b>Level Kinerja</b>	<b>Target 2024</b>
1	SP. 1 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	IKP 1.1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	Deputi Bidang Persidangan	3,33
2	SP. 1 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	IKP 1.1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Bidang Administrasi	3,35
3	SP. 1 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	IKP 1.1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	Badan Keahlian	3,31

### **CSF 1.1.1 Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Persidangan**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	<b>Level Kinerja</b>	<b>Target 2024</b>
1	SK.1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dan Risalah	IKK 1.1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan I	100%
		IKK 1.2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan I	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
		IKK 1.3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Persidangan I	Biro Persidangan I	3,34
2	SK.1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	IKK 1.1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan II	100%
		IKK 1.2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Persidangan II	Biro Persidangan II	3,35
3	SK.1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK.1.1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	Biro Kesekretariatan Pimpinan	100%
		IKK.1.2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	Biro Kesekretariatan Pimpinan	100%
		IKK.1.3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	Biro Kesekretariatan Pimpinan	100%
		IKK 1.4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI	Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,35
4	SK. 1 Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	IKK. 1.1. Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	100%
		IKK. 1.2. Persentase Laporan Kegiatan	Biro Kerjasama Antar Parlemen	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
		Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	dan Organisasi Internasional	
		IKK. 1.3. Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	100%
		IKK 1.4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	3,28
5	SK.1 Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI	IKK.1.1 Jumlah Penonton / Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI	Biro Pemberitaan Parlemen	450.00 0.000 Penonton
		IKK. 1.2 Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI	Biro Pemberitaan Parlemen	10 Jam
		IKK. 1.3 Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	Biro Pemberitaan Parlemen	300.00 0 Pengunjung
		IKK 1.4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen	Biro Pemberitaan Parlemen	3,25
6	SK. 2 Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI	IKK. 2.1 Jumlah <i>Viewer</i> Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama <i>Online</i>	Biro Pemberitaan Parlemen	100.00 0.000 Penonton
7	SK. 1 Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi	IKK. 1.1 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	Biro Protokol dan Humas	3,35
		IKK. 1.2 Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Biro Protokol dan Humas	Informatif (98,15 )
		IKK. 1.3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	Biro Protokol dan Humas	3,23
		IKK. 1.4. Nilai Pengawasan Kearsipan	Biro Protokol dan Humas	A (88)

**CSF 1.1.2 Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Keahlian DPR RI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2023
1	SK.1.Terlaksananya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	IKK. 1.1 Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	100%
		IKK. 1.1 Persentase Undang-Undang Memiliki Konsep Naskah Akademik, draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	100%
		IKK. 1.3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	3,28
2	SK.1.Terlaksananya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	IKK. 1.1 Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	100%
		IKK. 1.1 Persentase Undang-Undang Memiliki Konsep Naskah Akademik, draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	100%
		IKK. 1.3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi,	3,28

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2023
		Undang-Undang Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	
3	SK. 1 Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI	IKK. 1.1 Persentase Analisis / Referensi / Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	100%
		IKK. 1.2 Persentase Ringkasan / Telaahan / Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	100%
		IKK. 1.3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	3,30
4	SK. 1 Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan Pimpinan	IKK. 1.1 Persentasi hasil analisis legislatif, isu sepekan, info singkat, Parliamentary Review, jurnal bukom dan Prosiding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	Pusat Analisis Keparlemenan	100%
		IKK. 1.2 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan	Pusat Analisis Keparlemenan	3,29
5	SK. 1 Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	IKK. 1.1 Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%
		IKK. 1.2 Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2023
		Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
		IKK. 1.3 Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%
		IKK. 1.4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,26

## CSF 2 Meningkatnya Capaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Level Kinerja	Target 2024
1	SS.2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	IKSS 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	Sekjen	A (88,00)

### CSF 2.1 Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Setjen DPR RI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja	Target 2024
1	SP. 2 Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	IKP 2.1 Hasil Pengawasan Kearsipan	Deputi Bidang Persidangan	A (88)
		IKP 2.2 Peringkat Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik		Informatif (98,15)

2	SP. 2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	IKP 2.1 Nilai RB General Setjen DPR RI	Deputi Bidang Administrasi	A (88,00)
		IKP 2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI		BB (80,00)
3	SP. 1 Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	IKP 1.1 Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI	Inspektorat Utama	Level 3 (3,28)
4	SP. 2. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Setjen DPR RI	IKP 2.1 Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI		Level 3 (3,2)
5	SP. 3. Meningkatnya penerapan Zona Integritas di lingkup Setjen DPR RI	IKP 3.1. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM		6
6	SP. 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	IKP 3.1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Persidangan	Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)
7	SP. 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	IKP 3.1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Administrasi	Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)
8	SP 2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	IKP 2.1 Nilai SAKIP Badan Keahlian	Badan Keahlian	BB (80,00)
9	SP 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang berkualitas	IKP 4.1 Nilai SAKIP Inspektorat Utama	Inspektorat Utama	BB (80,00)

### CSF 2.1.1. Terwujudnya Kebijakan Lingkup Setjen DPR RI yang Berkualitas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.1. Persentase capaian pembentukan produk hukum (output)	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	100%
		IKK 1.2. Indeks Kepuasan penggunaan		3,30

		layanan Biro Hukum dan Dumas		
--	--	------------------------------	--	--

### CSF 2.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.2. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	3,30
2	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro SDM Aparatur	IKK 1.3. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Biro SDM Aparatur	Biro SDM Aparatur	3,19
3	SK.2. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	IKK 1.2. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	
4	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK 1.2. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Biro Keuangan	Biro Keuangan	3,42
5	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	IKK 1.2. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33
6	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Umum	IKK 1.2. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Biro Umum	Biro Umum	3,35
7	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	IKK 2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Teknologi Informasi	Pusat Teknologi Informasi	3,32
8	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK 1.5. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Kesekretariatan Pimpinan	Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,35
9	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan keprotokolan, kehumasan, dan layanan informasi Setjen DPR RI	IKK 1.1. Persentase dukungan keprotokolan dan Humas Setjen DPR RI	Biro Protokol dan Humas	100%
		IKK 1.2. Persentase dukungan layanan Perpustakaan Setjen DPR RI	Biro Protokol dan Humas	100%
		IKK. 2.1 Nilai Keterbukaan informasi publik	Biro Protokol dan Humas	Informatif (98,15)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
10	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.4. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	100%

### CSF 2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK.2. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	IKK 2.1. Indeks Kelembagaan	Biro Perencanaan dan Organisasi	77,77
2	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan keprotokolan, kehumasan, dan layanan informasi Setjen DPR RI	IKK. 1.4 Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Protokol dan Humas	A (88)
3	SK. 1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK. 1.1 Indeks Pengelolaan Aset	Biro Keuangan	3,7
4	SK. 1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK. 1.1 Persentase Pegawai Non. Aparatur Sipil Negara yang Sesuai Kompetensi	Biro SDM Aparatur	99%
		IKK. 1.2. Indeks Sistem Merit	Biro SDM Aparatur	356
5	SK.1. Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM	IKK. 1.1. Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	62,5%
		IKK. 1.2. Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	92,5%

### CSF 2.1.4. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK.1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dan Risalah	IKK. 1.4. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan I	Biro Persidangan I	98%
2	SK.1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	IKK. 1.3. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan II	Biro Persidangan II	98%
3	SK.1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK. 1.5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	Biro Kesekretariatan Pimpinan	99%
4	SK. 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Diplomasi Parlemen	IKK. 1.5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	98%
5	SK. 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Pemberitaan DPR RI	IKK. 1.5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	Biro Pemberitaan Parlemen	98%
6	SK. 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi	IKK. 1.5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	98%
7	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.3 Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	98%
8	SK. 1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK 1.4. Persentase realisasi anggaran Biro SDM Aparatur	Biro SDM Aparatur	98%
9	SK.2. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	IKK. 2.4 Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	99%
10	SK. 1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK. 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan	Biro Keuangan	98%
11	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	IKK. 1.2 Persentase Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99%
12	SK.1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Umum	IKK. 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	Biro Umum	99%
13	SK. 1 Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait dengan	IKK. 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang	98%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	Politik, Hukum, dan HAM	
14	SK. 1 Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	IKK. 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	98%
15	SK. 1 Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	IKK. 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	99%
16	SK. 1 Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	IKK. 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Analisis Keparlemenan	Pusat Analisis Keparlemenan	98%
17	Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	IKK. 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	98%
18	SK. 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Bidang Tugas Inspektorat I	IKK.1.4 Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat I	Inspektorat I	98%
19	SK. 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Bidang Tugas Inspektorat II	IKK.1.4 Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	Inspektorat II	98%
20	SK 2. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	IKK 2.1. Persentase Realisasi Anggaran	Pusat Teknologi Informasi	98%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
		Pusat Teknologi Informasi		
21	SK 1. Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM legislatif secara efektif dan efisien	IKK.1.4 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	98%
22	SK. 1 Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK. 1.4 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI	Seluruh Unit Eselon II	96
		IKK. 1.5 Opini BPK atas laporan keuangan	Biro Keuangan	WTP

### CSF 2.1.5 Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK 1. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI	IKK 1.1 Nilai SAKIP Setjen DPR RI	Biro Perencanaan dan Organisasi	BB (80,00)
2	SK. 2. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR RI	IKK 2.4 Persentase unit kerja yang telah Menyusun risk register dan rencana tindak pengendaliannya	Biro Perencanaan dan Organisasi	100%

### CSF 2.1.6 Terwujudnya Pengawasan Internal di Lingkup Setjen DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	IKK 1.1 Jumlah unit kerja di lingkup kerja Inspektorat I yang memenuhi syarat pengusulan predikat predikat WBK/WBBM ke TPN	Inspektorat I	4 Unit
		IKK 1.2 Persentase Pejabat Tinggi Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat I yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKPN sesuai ketentuan peraturan	Inspektorat I	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
		perundang-undangan yang berlaku		
		IKK 1.3 Persentase Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat I yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Inspektorat I	100%
2	SK 2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut auditor di lingkup tugas Inspektorat I	IKK 2.1 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I	Inspektorat I	90%
		IKK 2.2 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I	Inspektorat I	57%
3	SK 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	IKK 1.1 Jumlah unit kerja di lingkup kerja Inspektorat II yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK/WBBM ke TPN	Inspektorat II	3 Unit
		IKK 1.2 Persentase Pejabat Tinggi Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat II yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Inspektorat II	100%
		IKK 1.3 Persentase Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat II yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKASN sesuai ketentuan peraturan	Inspektorat II	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
		perundang-undangan yang berlaku		
4	SK 2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut auditor di lingkup tugas Inspektorat II	IKK 2.1 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	Inspektorat II	94%
		IKK 2.2 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	Inspektorat II	76%
5	SK 1. Meningkatnya kualitas dukungan Umum	IKK 1.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI (Sumber: SE Kepala LKPP no.4 tahun 2021)	Biro Umum	Predikat "Baik"

#### CSF 2.1.7. Terwujudnya Pemerintahan Setjen DPR RI Berbasis Elektronik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	SK 1. Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis elektronik	IKK 1.1 Indeks SPBE Setjen DPR Ri	Pusat Teknologi Informasi	Sangat Baik (3,6)

#### CSF 2.2 Terwujudnya Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Setjen DPR RI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja	Target 2024
1	SP. 2 Terwujudnya dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung Reformasi Birokrasi Tematik pemerintah	IKP.2.1. Persentase Pemanfaatan naskah akademik peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan naskah kajian yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Badan Keahlian	100%

#### CSF 2.2.1 Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Setjen DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja	Target 2024
1	Terlaksananya penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Persentase pemanfaatan naskah akademik peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	100%
			Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	100%
2	Terlaksananya penyusunan naskah rancangan undang-undang yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Persentase pemanfaatan naskah rancangan undang-undang yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	100%
			Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	100%
3	Terlaksananya penyusunan naskah kajian yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Persentase pemanfaatan naskah kajian yang mendukung pencapaian RB Tematik Pemerintah	Pusat Analisis Keparlemenan	100%
			Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	100%
			Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%

### **BAB III PENUTUP**

Penyusunan penjenjangan kinerja pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Dengan demikian, penyusunan penjenjangan kinerja pada DPR RI bertujuan untuk memastikan setiap individu di dalam organisasi memiliki peranan/kontribusi yang jelas dan terukur (sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab) dalam mendukung pencapaian dari visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi.

Dokumen penjenjangan kinerja ini berisikan sasaran-sasaran strategis/program/ kegiatan, indikator kinerja dan target serta pohon kinerja mulai dari tingkat Eselon I dan Eselon II. Dengan demikian, dokumen penjenjangan kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh satuan kerja dan individu di lingkup DPR RI dalam upaya mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh pihak di dalam organisasi, mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana. Pencapaian sasaran dan target dari indikator kinerja juga akan berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga berkontribusi dalam menyukseskan implementasi reformasi birokrasi di lingkup DPR RI. Dengan demikian, DPR RI diharapkan dapat menjadi organisasi yang berkinerja tinggi, akuntabel, efisien, dan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna layanannya.

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



Drs. Helmizar, M.E.

# LAMPIRAN

ESELON I	
SEKRETARIS JENDERAL	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI 3.74
SASARAN PROGRAM	
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas
1	Indeks Reformasi Birokrasi A (88,00)
2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB (80,00)
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
4	Hasil penilaian maturitas SPIP Level 3 (3,28)
5	Hasil penilaian kapabilitas APIP Level 3 (3,2)
6	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK 6
7	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR A (88)
SASARAN PROGRAM	
S.3	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik
1	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Informatif (96,15)
2	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Sangat Baik (3,6)

ESELON I	
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas
1	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Informatif (96,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Persidangan 96
SASARAN PROGRAM	
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan 3.33
SASARAN PROGRAM	
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan BB (88,00)

ESELON I	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Predikat "baik"
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Administrasi 96
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset 3.7
4	Nilai Sistem Merit 356
SASARAN PROGRAM	
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi 3.35
SASARAN PROGRAM	
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi BB (80,00)

ESELON I	
BADAN KEAHLIAN	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI 3.31
SASARAN PROGRAM	
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Badan Keahlian BB (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian 96

ESELON I	
INSPEKTUR UTAMA	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
1	Indeks Reformasi Birokrasi A (88)
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja B (80,00)
3	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK 6
4	Tingkat kepatuhan LHKPN 100%
5	Tingkat kepatuhan LHKAN 100%
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektur Utama 96
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI
1	Skor maturitas SPIP Level 3 (3,28)
SASARAN PROGRAM	
S.3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK 90%
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP 68%
SASARAN PROGRAM	
S.4	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama
1	Nilai Evaluasi AKIP di lingkungan Inspektorat Utama B (80,00)
2	Tingkat penilaian kapabilitas APIP Level 3 (3,28)

ESELON II	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas
1	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Informatif (96,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Persidangan 96

ESELON II	
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
1	Persentase keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP dalam Satu Tahun 62,5%
2	Persentase Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan 92,5%
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif 96
4	Persentase Realisasi Anggaran 98%

ESELON II	
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik
1	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sangat Baik (3,6)
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi
1	Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 91%
2	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi 96%
3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi 3.32
4	Persentase realisasi Anggaran 98%





ESELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbacaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbacaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
	Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)

ESELON II BIRO PERSIDANGAN I SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	
	Indikator	Target
1	Persentase Skenario dan Laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Persentase Skenario dan Risalah Report Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,34
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
5	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	98%

ESELON III BAGIAN RISALAH SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Pelayanan dan Tata Usaha Risalah	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Risalah	5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Risalah	5 Dokumen
3	Laporan Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Perisalah dan Perisalah Kelengkapan	2 Dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Risalah	4 Dokumen

ESELON IV SUB BAGIAN PELAYANAN RISALAH SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan V	1 Dokumen
6	Laporan Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Perisalah dan Perisalah Kelengkapan	2 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA RISALAH SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Tata Usaha Persidangan Paripurna	
	Indikator	Target
1	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Risalah	4 Dokumen

BIRO PERSIDANGAN II

ESELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbacaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbacaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
	Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)

ESELON II BIRO PERSIDANGAN II SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	
	Indikator	Target
1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan II	3,35
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	98%

ESELON III BAGIAN SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Rapat dan Tata Usaha Badan Legislatif	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Badan Legislatif	5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Badan Legislatif	5 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Legislatif	4 Dokumen

ESELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Rapat Badan Legislatif	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan V	1 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Tata Usaha Badan Legislatif	
	Indikator	Target
1	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Legislatif	4 Dokumen

ESELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbacaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbacaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
	Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)

ESELON II BIRO PERSIDANGAN II SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	
	Indikator	Target
1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan II	3,35
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	98%

ESELON III BAGIAN SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha persidangan Badan Anggaran	
	Indikator	Target
1	Laporan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023	2 Dokumen
2	Laporan Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2024	2 Dokumen
3	Laporan Pembahasan RUU tentang APBN Perubahan TA 2024	2 Dokumen
4	Laporan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPEN TA 2025	2 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Pembahasan RUU tentang APBN TA 2025	2 Dokumen
6	Laporan Rapat Pembahasan Kegiatan Badan Anggaran Lainnya	2 Dokumen
7	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Anggaran	4 Dokumen

ESELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan rapat Badan Anggaran	
	Indikator	Target
1	Laporan Rapat Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023	1 Dokumen
2	Laporan Rapat Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2024	1 Dokumen
3	Laporan Rapat Pembahasan RUU tentang APBN Perubahan TA 2024	1 Dokumen
4	Laporan Rapat Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPEN TA 2025	1 Dokumen
5	Laporan Rapat Kegiatan Pembahasan RUU tentang APBN TA 2025	1 Dokumen
6	Laporan Rapat Pembahasan Kegiatan Badan Anggaran Lainnya	1 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Tata Usaha Badan Anggaran	
	Indikator	Target
1	Laporan Tata Usaha Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2024	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Pembahasan RUU tentang APBN Perubahan TA 2024	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPEN TA 2025	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Kegiatan Pembahasan RUU tentang APBN TA 2025	1 Dokumen
6	Laporan Tata Usaha Pelaksanaan Kegiatan Badan Anggaran Lainnya	1 Dokumen
7	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Anggaran	4 Dokumen

ESELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbacaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbacaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
	Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)

ESELON II BIRO PERSIDANGAN II SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	
	Indikator	Target
1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan II	3,35
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	98%

ESELON III BAGIAN SEKRETARIAT BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	5 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	4 Dokumen

ESELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA SASARAN		
S.1	Meningkatnya dukungan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan V	1 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Tata Usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	
	Indikator	Target
1	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	4 Dokumen

ESELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbacaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbacaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
	Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)

ESELON II BIRO PERSIDANGAN II SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	
	Indikator	Target
1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan II	3,35
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	98%

ESELON III BAGIAN SEKRETARIAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat, tata usaha dan administrasi perkara persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Badan Mahkamah Kehormatan Dewan	5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Mahkamah Kehormatan Dewan	5 Dokumen
3	Laporan Administrasi Perkara	5 Dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	4 Dokumen

ESELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan	
	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan V	1 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan	
	Indikator	Target
1	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	4 Dokumen

SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERKARA WTD SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan administrasi penanganan perkara Mahkamah Kehormatan Dewan	
	Indikator	Target
1	Laporan Administrasi Perkara Masa Persidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Administrasi Perkara Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Administrasi Perkara Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Administrasi Perkara Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Administrasi Perkara Masa Persidangan V	1 Dokumen

ESKON I		
DEPUTI BIDANG PERISDANGAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Perisidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Perisidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Perisidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di lingkungan Deputi Bidang Perisidangan	BB (80,00)

ESKON II		
BIRO PERISDANGAN II		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Perisidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	
Indikator		
1	Persentase skenario dan laporan singkat perisidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perisidangan II	3,35
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase realisasi anggaran Biro Perisidangan II	98%

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha perisidangan Badan Urusan Rumah Tangga	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Badan Urusan Rumah Tangga	5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Badan Urusan Rumah Tangga	5 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat BURT	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat Badan Urusan Rumah Tangga	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan V	1 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat BURT	4 Dokumen

ESKON I		
DEPUTI BIDANG PERISDANGAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Perisidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Perisidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Perisidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di lingkungan Deputi Bidang Perisidangan	BB (80,00)

ESKON II		
BIRO PERISDANGAN II		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Perisidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	
Indikator		
1	Persentase skenario dan laporan singkat perisidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perisidangan II	3,35
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase realisasi anggaran Biro Perisidangan II	98%

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha Panitia Khusus	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Panitia Khusus	5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Panitia Khusus	5 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Panitia Khusus	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan Rapat Panitia Khusus	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Perisidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Panitia Khusus	4 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan Tata Usaha Panitia Khusus	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan I	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Perisidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Panitia Khusus	4 Dokumen

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

ESKON I		
DEPUTI BIDANG PERISDANGAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Perisidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Perisidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Perisidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di lingkungan Deputi Bidang Perisidangan	BB (80,00)

ESKON II		
BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	
Indikator		
1	Persentase Dukungan Perisidangan DPR RI	100%
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
4	Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI Terhadap	3,35
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99,00%

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT KETUA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Ketua DPR RI	12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Ketua DPR RI	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Ketua DPR RI	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KETUA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu dan perjalanan dinas Ketua DPR RI	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan	12 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT KETUA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan tata usaha Ketua DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Ketua DPR RI	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Ketua DPR RI	12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Ketua DPR RI	4 Dokumen

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan kerumahtanggaan dan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu dan perjalanan dinas Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	12 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan tata usaha Ketua DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	4 Dokumen

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan kerumahtanggaan dan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	12 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan tata usaha Ketua DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	4 Dokumen

ESKON I		
DEPUTI BIDANG PERISDANGAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Pengawasan Keairisan Lembaga DPR	A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Perisidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Perisidangan	3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Perisidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di lingkungan Deputi Bidang Perisidangan	BB (80,00)

ESKON II		
BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	
Indikator		
1	Persentase Dukungan Perisidangan DPR RI	100%
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
4	Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI Terhadap	3,35
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99,00%

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan kerumahtanggaan dan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua DPR RI, Ekonomi dan Keuangan	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	12 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan tata usaha Ketua DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI, Ekonomi dan Keuangan	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	4 Dokumen

ESKON III		
BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan kerumahtanggaan dan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Dokumen

ESKON IV		
SUB BAGIAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu dan perjalanan dinas Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat	
Indikator		
1	Laporan Kerumahtanggaan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen

ESKON V		
SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya urusan tata usaha Ketua DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Dokumen

ESKELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Penawaran Keasrian Lomba DPR	Target A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	Target 3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	Target BB (89,00)

ESKELON II BIRO SEKRETARIATAN PIMPINAN SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretaratan Pimpinan	
Indikator		
1	Persentase Dukungan Persidangan DPR RI	Target 100%
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
4	Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretaratan Pimpinan DPR RI Terhadap	3,35
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99,00%

ESKELON III BAGIAN SEKRETARIAT BIDANG MUSTAWARAH SASARAN		
S.1	Terlaksananya pelayanan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah dan pelaksanaan dukungan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Badan Musyawarah	Target 5 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Badan Musyawarah	5 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	4 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT BIDANG MUSTAWARAH SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan penyipan bahan dan penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Bioskrap Badan Musyawarah I	Target 1 Dokumen
2	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan I	1 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan II	1 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan III	1 Dokumen
5	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan IV	1 Dokumen
6	Laporan Kegiatan Rapat Masa Persidangan V	1 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT BIDANG MUSTAWARAH SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha pengendian Badan Musyawarah Republik Indonesia	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan I	Target 1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan II	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan III	1 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan IV	1 Dokumen
5	Laporan Tata Usaha Masa Persidangan V	1 Dokumen
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	4 Dokumen

ESKELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Penawaran Keasrian Lomba DPR	Target A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	Target 3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	Target BB (89,00)

ESKELON II BIRO SEKRETARIATAN PIMPINAN SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretaratan Pimpinan	
Indikator		
1	Persentase Dukungan Persidangan DPR RI	Target 100%
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
4	Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretaratan Pimpinan DPR RI Terhadap	3,35
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99,00%

ESKELON III BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT JENDERAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha kepanitia Pimpunan Sekretariat Jenderal dan pengelolahan tata persurutan	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi	12 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan	12 Dokumen
4	Laporan Kegiatan dan Anggaran Bagian TU Pimpinan Sekretariat Jenderal	12 Dokumen
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian TU Pimpinan Sekretariat Jenderal	4 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha kepada Sekretaris Jenderal	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Target 12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian TU Pimpinan Sekretariat Jenderal	4 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian TU Pimpinan Sekretariat Jenderal	4 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA BIDANG PERSIDANGAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha kepada Deputi Bidang Persidangan dan Kepala Biro di Deputi Bidang Persidangan	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan	Target 12 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA BIDANG ADMINISTRASI SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha kepada Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Biro di Deputi Bidang Administrasi	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi	Target 12 Dokumen

SUB BAGIAN TATA PERUSURAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan dan penunasan surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan	Target 12 Dokumen

ESKELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Penawaran Keasrian Lomba DPR	Target A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	Target 3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	Target BB (89,00)

ESKELON II BIRO SEKRETARIATAN PIMPINAN SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretaratan Pimpinan	
Indikator		
1	Persentase Dukungan Persidangan DPR RI	Target 100%
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
4	Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretaratan Pimpinan DPR RI Terhadap	3,35
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99,00%

ESKELON III BAGIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN FRAKSI SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengelolaan administrasi kesekretaratan fraksi	
Indikator		
1	Laporan Administrasi Keanggotaan DPR RI	Target 12 Dokumen
2	Laporan Administrasi Kesekretaratan Fraksi	8 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Administrasi Keanggotaan dan Kesekretaratan Fraksi	12 Dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretaratan Fraksi	4 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
Indikator		
1	Laporan Administrasi Keanggotaan DPR RI	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Administrasi Keanggotaan dan Kesekretaratan Fraksi	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretaratan Fraksi	4 Dokumen

SUB BAGIAN KESEKRETARIATAN FRAKSI SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan pengelolaan administrasi kesekretaratan fraksi	
Indikator		
1	Laporan Administrasi Fraksi	Target 8 Dokumen

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

ESKELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Penawaran Keasrian Lomba DPR	Target A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	Target 3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	Target BB (89,00)

ESKELON II BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Diplomasi Parlemen	
Indikator		
1	Persentase Kajian, Riset, Pemetaan, Sambutan, Talking Point, dan Laporan Kegiatan, Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	Target 100%
2	Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
3	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
4	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,28
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%

ESKELON III BAGIAN SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha urusan kerja sama organisasi parlemen internasional dan kerja sama organisasi multilateral internasional Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Kerjasama Organisasi Internasional	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Kerjasama Organisasi Internasional	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional	4 Dokumen
4	Laporan Kegiatan Association of Secretaris General of Parliaments of (ASGPP)	1 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan penyipan bahan dan penyelenggaraan rapat urusan kerja sama organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Kerjasama Organisasi Internasional	Target 12 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha persidangan urusan kerja sama organisasi internasional Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Kerjasama Organisasi Internasional	Target 12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional	4 Dokumen
3	Laporan Kegiatan Association of Secretaris General of Parliaments of (ASGPP)	1 Dokumen

ESKELON III BAGIAN SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI REGIONAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha urusan kerja sama organisasi parlemen regional dan kerja sama organisasi multilateral regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Kerjasama Organisasi Regional	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Kerjasama Organisasi Regional	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional	4 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI REGIONAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan penyipan bahan dan penyelenggaraan rapat urusan kerja sama organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Kerjasama Organisasi Regional	Target 12 Dokumen

SUB BAGIAN RAPAT TATA USAHA SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI REGIONAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha persidangan urusan kerja sama organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Kerjasama Organisasi Regional	Target 12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional	4 Dokumen

ESKELON I DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		
1	Hasil Penawaran Keasrian Lomba DPR	Target A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	
Indikator		
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	Target 3,33
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	
Indikator		
1	Nilai Evaluasi SAMP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	Target BB (89,00)

ESKELON II BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Diplomasi Parlemen	
Indikator		
1	Persentase Kajian, Riset, Pemetaan, Sambutan, Talking Point, dan Laporan Kegiatan, Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	Target 100%
2	Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
3	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
4	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,28
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%

ESKELON III BAGIAN SEKRETARIAT KERJASAMA ORGANISASI BILATERAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha urusan kerja sama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Kerjasama Bilateral	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Kerjasama Bilateral	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral	4 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN RAPAT SEKRETARIAT KERJASAMA BILATERAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan penyipan bahan dan penyelenggaraan rapat urusan kerja sama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Kegiatan Rapat Kerjasama Bilateral	Target 12 Dokumen

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT KERJASAMA BILATERAL SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha persidangan urusan kerja sama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Tata Usaha Kerjasama Bilateral	Target 12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral	4 Dokumen

ESKELON III BAGIAN FASILITASI KEGIATAN LUAR NEGERI ANGGOTA DAN ALIH BAHASA SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa	12 Dokumen
3	Laporan Dukungan Alih Bahasa	12 Dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa	8 Dokumen

ESKELON IV SUB BAGIAN FASILITASI KEGIATAN LUAR NEGERI ANGGOTA SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan penyipan bahan dan penyelenggaraan rapat urusan kerja sama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota	Target 12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota	4 Dokumen

SUB BAGIAN ALIH BAHASA SASARAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Alih Bahasa Badan Kerja Sama Antar Parlemen	
Indikator		
1	Laporan Dukungan Alih Bahasa	Target 12 Dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Alih Bahasa	4 Dokumen

BIRO PROTOKOL DAN HUMAS

ESELON I			
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhinya kepatuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAMIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (88,00)	

ESELON II			
BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	3,35	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Indeks Kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Perputakaan	3,23	
4	Nilai Pengawasan Kearsipan	A (88)	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%	

ESELON III			
BAGIAN PROTOKOL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya dukungan keprotokolan dalam acara DPR RI dan Setjen	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Layanan Perencanaan Tamu Delegasi Luar Negeri	1 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Layanan Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI	5 Dokumen	
3	Layanan Kerjasama Bandara	15,545 kali	
4	Laporan Kegiatan Layanan pada Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kengerangan Presiden RI Dalam Rangka Penempatan RAPBN	3 Dokumen	
5	Laporan Kegiatan Layanan pada Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kengerangan Presiden RI Dalam Rangka Penyempitan RAPBN	1 Dokumen	
6	Laporan Kegiatan Layanan pada Rapat Paripurna Sidang Bersama Dalam Rangka HUT DPR RI	3 Dokumen	
7	Laporan Kegiatan Layanan pada Penilaian Anggota DPR RI dan Pejabat Setjen DPR RI	2 Dokumen	
8	Laporan Kegiatan Layanan Persemyaman dan Upacara Bendera	4 Dokumen	
9	Laporan Kegiatan Layanan Upacara Lainnya pada kegiatan Dewan dan Setjen DPR RI	12 Dokumen	
10	Laporan Tata Usaha Bagian Protokol	12 Dokumen	
11	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Protokol	4 Dokumen	

ESELON IV			
SUB BAGIAN ACARA PIMPINAN DPR RI DAN SETJEN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya Acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Layanan Perencanaan Tamu Delegasi Luar Negeri	1 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Layanan Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI	5 Dokumen	
3	Layanan Kerjasama Bandara	15,545 kali	

SUB BAGIAN ACARA ALAT KELENGKAPAN DEWAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya Acara Alat Keleengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Indikator	Target
1	Laporan Tata Usaha Bagian Protokol	12 Dokumen	
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Protokol	4 Dokumen	

SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN UPACARA DPR RI DAN SETJEN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Layanan pada Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kengerangan Presiden RI Dalam Rangka Penyempitan RAPBN	3 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Layanan pada Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kengerangan Presiden RI Dalam Rangka Penyempitan RAPBN	1 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Layanan pada Rapat Paripurna Sidang Bersama Dalam Rangka HUT DPR RI	3 Dokumen	
4	Laporan Kegiatan Layanan pada Penilaian Anggota DPR RI dan Pejabat Setjen DPR RI	2 Dokumen	
5	Laporan Kegiatan Layanan Persemyaman dan Upacara Bendera	4 Dokumen	
6	Laporan Kegiatan Layanan Upacara Lainnya pada kegiatan Dewan dan Setjen DPR RI	12 Dokumen	

ESELON I			
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhinya kepatuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAMIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (88,00)	

ESELON II			
BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	3,35	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Indeks Kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Perputakaan	3,23	
4	Nilai Pengawasan Kearsipan	A (88)	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%	

ESELON III			
BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik	Indikator	Target
1	Laporan Penemuan Informasi/Sebelum dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	11 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Parlemen Goes To School	1 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Parlemen Remaja	1 Dokumen	
4	Laporan Kegiatan Parlemen Kampus	1 Dokumen	
5	Laporan Penemuan Delegasi Masyarakat	8 Dokumen	
6	Laporan Kegiatan Pameran di Dalam Kota	2 Dokumen	
7	Laporan Kegiatan Pameran di Luar Kota	2 Dokumen	
8	Laporan Kegiatan Gelar Budaya	1 Dokumen	
9	Laporan Seminar Bahahumans	3 Dokumen	
10	Laporan Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Kehumasan DPR RI	2 Dokumen	
11	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	
12	Laporan Kegiatan Layanan Museum	3 Dokumen	
13	Laporan Tata Usaha Bagian Humas dan Pengelolaan Museum	12 Dokumen	
14	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Humas dan Pengelolaan Museum	4 Dokumen	

ESELON IV			
SUB BAGIAN INFORMASI PUBLIK DAN KUNJUNGAN MASYARAKAT			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pelayanan informasi publik dan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran kunjungan masyarakat	Indikator	Target
1	Laporan Penemuan Informasi/Sebelum dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	11 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Parlemen Goes To School	1 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Parlemen Remaja	1 Dokumen	
4	Laporan Kegiatan Parlemen Kampus	1 Dokumen	
5	Laporan Penemuan Delegasi Masyarakat	8 Dokumen	

SUB BAGIAN PROMOSI, DISEMINASI DAN EDUKASI PUBLIK			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya kegiatan promosi, diseminasi informasi, serta memberikan edukasi terkait pelaksanaan wawancara dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Pameran di Dalam Kota	2 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Pameran di Luar Kota	2 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Gelar Budaya	1 Dokumen	
4	Laporan Seminar Bahahumans	3 Dokumen	

SUB BAGIAN PENGELOLAAN MUSEUM			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengabdian, penyempitan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan museum serta pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Kehumasan DPR RI	2 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Layanan Museum	3 Dokumen	
4	Laporan Tata Usaha Bagian Humas dan Pengelolaan Museum	12 Dokumen	
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Humas dan Pengelolaan Museum	4 Dokumen	

BAGIAN PERPUTAAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan perputakaan	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Seminar/FGD/Bedah Buku/Talkshow	8 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perputakaan	36 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Bepositori Parlemen	2 Dokumen	
4	Laporan Kegiatan Literasi Informasi Parlemen	7 Dokumen	
5	Laporan Kegiatan Pengembangan Kebijakan Perputakaan	2 Dokumen	
6	Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Perputakaan	5 Dokumen	

ESELON I			
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhinya kepatuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAMIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (88,00)	

ESELON II			
BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pembantuan Parlemen	3,35	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Indeks Kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Perputakaan	3,23	
4	Nilai Pengawasan Kearsipan	A (88)	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%	

ESELON III			
BAGIAN ARSIP			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan kearsipan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Pameran/Seminar/Workshop Kearsipan	11 Dokumen	
2	Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kearsipan	16 Dokumen	
3	Laporan Kegiatan Ariti Media Arsip	8 Dokumen	
4	Laporan Kegiatan Penelitian Data Kearsipan	2 Dokumen	
5	Laporan Kegiatan Pengembangan Sistem dan Prastara Kearsipan	12 Dokumen	

ESELON IV			
SUB BAGIAN MEDIA CETAK DAN WEBSITE			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan pembantuan di media cetak dan website	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan DPR di Media Cetak	75 Dokumen	
2	Laporan Tim Website	1 Dokumen	
3	Terbitan Majalah dan Buletin Parlemen	60 Dokumen	

ESELON I			
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (88,15)	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhinya kepatuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAMIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (88,00)	

ESELON II			
BIRO PEMBANTUAN PARLEMEN			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Pembantuan DPR RI	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pembantuan Parlemen	3,25	
2	Jumlah Pembantu/Pendengar terhadap Program Tindakan/Baran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI	450 juta	
3	Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI	10 jam	
4	Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	100.000 Pengunjung	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%	
SASARAN KEGIATAN			
S.2	Meningkatnya Keterbukaan Publik Terhadap Media Sosial dan Website	Indikator	Target
1	Jumlah Viewer Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama Online	100.000.000	

ESELON III			
BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan pembantuan di media cetak, media sosial, serta analisis media	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan DPR di Media Cetak	75 Dokumen	
2	Laporan Tim Website	1 Dokumen	
3	Terbitan Majalah dan Buletin Parlemen	60 Dokumen	
4	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan wartawan/Pemimpin Redaksi	1 Dokumen	
5	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Anggota DPR RI	4 Dokumen	
6	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Pimpinan DPR RI	5 Dokumen	
7	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di luar DPR RI	4 Dokumen	
8	Publikasi Kegiatan DPR RI di Media Sosial	54 Dokumen	
9	Diseminasi Informasi Media Sosial	3 Dokumen	
10	Pameran/Workshop Foto Wartawan	4 Dokumen	
11	Penyusunan Strategi dan Komunikasi DPR RI	16 Dokumen	
12	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Analisis Media	3 Dokumen	
13	Laporan Tata Usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial	12 Dokumen	
14	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial	4 Dokumen	

ESELON IV			
SUB BAGIAN MEDIA CETAK DAN WEBSITE			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan pembantuan di media cetak dan website	Indikator	Target
1	Laporan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan DPR di Media Cetak	75 Dokumen	
2	Laporan Tim Website	1 Dokumen	
3	Terbitan Majalah dan Buletin Parlemen	60 Dokumen	

SUB BAGIAN MEDIA SOSIAL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan pembantuan di media sosial	Indikator	Target
1	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Anggota DPR RI	4 Dokumen	
2	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Pimpinan DPR RI	5 Dokumen	
3	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di luar kota	4 Dokumen	
4	Publikasi Kegiatan DPR RI di Media Sosial	54 Dokumen	
5	Diseminasi Informasi Media Sosial	3 Dokumen	

SUB BAGIAN ANALISIS MEDIA			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya analisis media dan pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial	Indikator	Target
1	Pameran/Workshop Foto Wartawan	4 Dokumen	
2	Penyusunan Strategi dan Komunikasi DPR RI	16 Dokumen	
3	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Analisis Media	3 Dokumen	
4	Laporan Tata Usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial	12 Dokumen	
5	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial	4 Dokumen	

ESKELON I		DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
Indikator		Target	
1	Hasil Pengawasan Kelembagaan DPR	A.1881	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (86,14)	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas		
Indikator		Target	
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)	

ESKELON II		BIRO PEMERINTAHAN PARLEMEN	
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Pemberitaan DPR RI		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen	3,35	
2	Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tyangan/Siaran TVR Parlemen dalam Memerolipkan Kegiatan DPR RI	Informatif (86,15)	
3	Tingkat Kecepatan Penyiangan Berita di Website DPR RI	3,23	
4	Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	300.000 Pengunjung	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%	
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Keterbukaan dan Transparansi Media Sosial dan Website		
Indikator		Target	
1	Jumlah Viewer Media Social DPR RI dan Media Kerjasama Online	100.000.000	

ESKELON III		BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
SASARAN			
S.1	Terlaksananya urusan pengembangan televisi dan radio		
Indikator		Target	
1	Sosialisasi Kegiatan DPR RI di Televisi	886 Dokumen	
2	Sosialisasi Kegiatan DPR RI di Radio	35 Dokumen	
3	Kegiatan Produksi dan Liputan TV Parlemen	14 kali	
4	Kegiatan Produksi dan Liputan Radio Parlemen	9 kali	
5	Liputan Suara Dapil	33 kali	
6	Forum Komunikasi dan Sosialisasi Wartawan TVR Parlemen	2 Dokumen	
7	Laporan Tata Usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen	12 Dokumen	
8	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Televisi dan Radio	4 Dokumen	

ESKELON IV		SUB BAGIAN PROGRAM DAN PRODUKSI TELEVISI	
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengembangan program dan produksi berita televisi		
Indikator		Target	
1	Sosialisasi Kegiatan DPR RI di Televisi	886 Dokumen	
2	Kegiatan Produksi dan Liputan TV Parlemen	14 kali	
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PRODUKSI RADIO			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengembangan program dan produksi berita radio, serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen		
Indikator		Target	
1	Sosialisasi Kegiatan DPR RI di Radio	35 Dokumen	
2	Kegiatan Produksi dan Liputan Radio Parlemen	9 kali	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen	12 Dokumen	
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Televisi dan Radio Parlemen	4 Dokumen	

ESKELON I		DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
Indikator		Target	
1	Hasil Pengawasan Kelembagaan DPR	A.1881	
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (86,14)	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas		
Indikator		Target	
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)	

ESKELON II		BIRO PEMERINTAHAN PARLEMEN	
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Pemberitaan DPR RI		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen	3,35	
2	Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tyangan/Siaran TVR Parlemen dalam Memerolipkan Kegiatan DPR RI	Informatif (86,15)	
3	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,23	
4	Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	300.000 Pengunjung	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	98,00%	
SASARAN KEGIATAN			
S.2	Meningkatnya Keterbukaan Publik Terhadap Media Sosial dan Website		
Indikator		Target	
1	Jumlah Viewer Media Social DPR RI dan Media Kerjasama Online	100.000.000	

ESKELON III		BAGIAN PENERBITAN	
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pencetakan produk terbitan Dewan dan Sekretariat Jenderal, baik terbitan konvensional maupun digital		
Indikator		Target	
1	Pencetakan Mulaiah Parlemen	12 Dokumen	
2	Pencetakan Buletin Parlemen	48 Dokumen	
3	Laporan Tim Pelaksana Penyusunan Standar Layanan Penerbitan	1 Dokumen	
4	Buku dan Hasil Cetakannya Lainnya (Pencetakan Booklet, Leaflet dan buku Pimipinan Dewan dan Setjen DPR RI)	29 Dokumen	
5	Pelaksanaan Digital Publishing dan Distribusi Melalui Media Digital	24 Dokumen	
6	Laporan Tata Usaha Bagian Penerbitan	17 Dokumen	
7	Laporan Distribusi	1 Dokumen	
8	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Penerbitan	4 Dokumen	

ESKELON IV		SUB BAGIAN PRODUKSI	
SASARAN			
S.1	Terlaksananya proses penyuntingan, penulisan naskah, pengembangan naskah, desain, editor visual, dan pencetakan naskah		
Indikator		Target	
1	Pencetakan Mulaiah Parlemen	12 Dokumen	
2	Pencetakan Buletin Parlemen	48 Dokumen	
3	Buku dan Hasil Cetakannya Lainnya (Pencetakan Booklet, Leaflet dan buku Pimipinan Dewan dan Setjen DPR RI)	29 Dokumen	
SUB BAGIAN DISTRIBUSI			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya kegiatan promosi, distribusi produk terbitan, dan kegiatan tata usaha Bagian Penerbitan		
Indikator		Target	
1	Laporan Tim Pelaksana Penyusunan Standar Layanan Penerbitan	1 Dokumen	
2	Pelaksanaan Digital Publishing dan Distribusi Melalui Media Digital	24 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Penerbitan	17 Dokumen	
4	Laporan Distribusi	1 Dokumen	
5	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Penerbitan	4 Dokumen	

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

SISTEM I			
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
Indikator		Target	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Prediksi "baik"	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7	
3	Nilai Sistem Merit	356	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas		
Indikator		Target	
1	Nilai Evaluasi SAMIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)	

SISTEM II			
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat		
Indikator		Target	
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Bidang Hukum	3,30	
2	Persentase Capaian Pembentukan Produk Hukum	100%	
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
5	Persentase Realisasi Anggaran	98%	

SISTEM III			
BAGIAN PEMERINTAHAN PRODUK HUKUM			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya perumusan dan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan Identifikasi dan Analisis Produk Hukum	3 Dokumen	
2	Laporan Sosialisasi Produk Hukum	1 Dokumen	
3	Laporan Pelaksanaan Program Sertifikasi Keahlian di Bidang Hukum	1 Dokumen	
4	Laporan Tata Usaha Bagian Pembentukan Produk Hukum	12 Dokumen	
5	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum	4 Dokumen	

SISTEM IV			
BAGIAN PERTIMBANGAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengfortolan dokumentasi dan informasi hukum		
Indikator		Target	
1	Laporan Mitigasi Konflik Hukum	1 Dokumen	
2	Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Hukum	2 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	12 Dokumen	
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	4 Dokumen	

SISTEM III			
BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan pemecahannya yang disampaikan ke DPR RI		
Indikator		Target	
1	Laporan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	
2	Laporan Pengembangan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	2 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Pengaduan Masyarakat	12 Dokumen	
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat	4 Dokumen	

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

SISTEM I			
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
Indikator		Target	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Prediksi "baik"	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7	
3	Nilai Sistem Merit	356	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas		
Indikator		Target	
1	Nilai Evaluasi SAMIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)	

SISTEM II			
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur		
Indikator		Target	
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	3,19	
2	Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi	99%	
3	Indeks sistem merit	356	
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
5	Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	98%	

SISTEM III			
BAGIAN PERENCANAAN POLA KARIR			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya perencanaan manajemen sumber manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Calon ASN Tahun Anggaran 2024	1 Dokumen	
2	Laporan Pola Karir ASN (Assesment) Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Fungsional	3 Dokumen	
3	Bimbingan Teknis Integritas Kegiatan ASN	1 Dokumen	
4	Laporan Mutasi dan Promosi (Assesment) IPT Midya, IPT Priziana dan Pegawai Prodiq Instansi	3 Dokumen	
5	Laporan Koordinasi Kemajuan Pengkaji	1 Dokumen	
6	Laporan Tata Usaha Bagian Perencanaan Pola Karir	12 Dokumen	
7	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Perencanaan Pola Karir	4 Dokumen	

SISTEM IV			
BAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN INFORMASI ASN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan manajemen kinerja dan manajemen informasi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kinerja ASN	3 Dokumen	
2	Laporan Pengelolaan Sistem Informasi ASN	4 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN	12 Dokumen	
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN	4 Dokumen	

SISTEM III			
BAGIAN MANAJEMEN SDM NON ASN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya dukungan administratif khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara		
Indikator		Target	
1	Laporan Tata Usaha Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota	6 Dokumen	
2	Laporan Layanan Administrasi Tenaga Sistem Pendukung	2 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Manajemen SDM Non ASN	12 Dokumen	
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Manajemen SDM Non ASN	4 Dokumen	

SISTEM III			
BAGIAN PEMBIINAAN JABATAN FUNGSIONAL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pembinaan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan Pelaksanaan Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional	12 Dokumen	
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional	4 Dokumen	

BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

SISTEM I			
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
Indikator		Target	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Prediksi "baik"	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7	
3	Nilai Sistem Merit	356	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi		
Indikator		Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas		
Indikator		Target	
1	Nilai Evaluasi SAMIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)	

SISTEM II			
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR		
Indikator		Target	
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,50	
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,0	
3	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11	
4	Persentase Unit Kerja yang Telah Memenuhi Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
6	Persentase Realisasi Anggaran	99%	
SASARAN KEGIATAN			
S.2	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR		
Indikator		Target	
1	Nilai Evaluasi Kelayakan	80	

SISTEM III			
BAGIAN PERENCANAAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya penyusunan rencana dan monitoring serta evaluasi program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan RKA Usulan Satker Dewan dan Setjen	3 Dokumen	
2	Laporan RKA Pagu Indikator Satker Dewan dan Setjen	3 Dokumen	
3	Laporan RKA Pagu Anggaran Satker Dewan dan Setjen	3 Dokumen	
4	Laporan RKA Pagu Alokasi Anggaran Satker Dewan dan Setjen	3 Dokumen	
5	Laporan RKA Daftar Isuan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dewan dan Setjen	2 Dokumen	
6	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	1 Dokumen	
7	Penyusunan Standar Harga di Lingkungan Setjen DPR RI	1 Dokumen	
8	Laporan Revisi Anggaran Satker Dewan dan Setjen	2 Dokumen	
9	Laporan Movev Bulanan	12 laporan	
10	Laporan Movev Triwulanan	4 laporan	
11	Laporan Monitoring dan Evaluasi Lainnya	2 laporan	
12	Laporan Tata Usaha Bagian Perencanaan	12 Dokumen	
13	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Perencanaan	4 Dokumen	

SISTEM III			
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPR			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya penyisipan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Perencanaan		
Indikator		Target	
1	Laporan RKA Usulan Satker Dewan	1 Dokumen	
2	Laporan RKA Pagu Indikator Satker Dewan	1 Dokumen	
3	Laporan RKA Pagu Anggaran Satker Dewan	1 Dokumen	
4	Laporan RKA Pagu Alokasi Anggaran Satker Dewan	1 Dokumen	
5	Laporan RKA Daftar Isuan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dewan	1 Dokumen	
6	Penyusunan Standar Harga di Lingkungan Setjen DPR RI	1 Dokumen	
7	Laporan Tata Usaha Bagian Perencanaan	12 Dokumen	
8	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Perencanaan	4 Dokumen	

SISTEM III			
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya penyisipan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan RKA Usulan Satker Setjen	2 Dokumen	
2	Laporan RKA Pagu Indikator Satker Setjen	2 Dokumen	
3	Laporan RKA Pagu Anggaran Satker Setjen	2 Dokumen	
4	Laporan RKA Pagu Alokasi Anggaran Satker Setjen	2 Dokumen	
5	Laporan RKA Daftar Isuan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Setjen	1 Dokumen	
6	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	1 Dokumen	

SISTEM III			
SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya revisi, monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal		
Indikator		Target	
1	Laporan Revisi Anggaran Satker Dewan	1 Dokumen	
2	Laporan Revisi Anggaran Satker Setjen	1 Dokumen	
3	Laporan Movev Bulanan	12 laporan	
4	Laporan Movev Triwulanan	4 laporan	
5	Laporan Monitoring dan Evaluasi Lainnya	2 laporan	

ESKELON I		
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		Target
1	Indeks Tata Kelola Pengabdian	Predikat "baik"
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7
4	Nilai Sistem Merit	356
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepasuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	
Indikator		Target
1	Indeks kepasuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	
Indikator		Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)

ESKELON II		
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	
Indikator		Target
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,5
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22
3	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11
4	Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99%
SASARAN KEGIATAN		
S.2	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	
Indikator		Target
1	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80

ESKELON III		
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal	
Indikator		Target
1	Laporan Penelaahan dan Penataan organisasi	1 Dokumen
2	Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen
3	Laporan Analisa Jabatan dan Beban Kerja	1 Dokumen
4	Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen
5	Laporan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen
6	Laporan Pembentukan Jabatan Fungsional	1 Dokumen
7	Laporan Peta Proses Bisnis	1 Dokumen
8	Laporan Penyusunan Standardisasi dan Evaluasi Prosedur, Norma, dan Standar Kerja	3 Dokumen
9	Laporan Tata Usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12 Dokumen
10	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana	4 Dokumen

ESKELON IV		
SUBBAGIAN ORGANISASI		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penataan dan penataan organisasi, integrasi sistem bagian di lingkungan Setjen DPR RI serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
Indikator		Target
1	Laporan Penelaahan dan Penataan organisasi	1 Dokumen
2	Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12 Dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana	4 Dokumen
SUBBAGIAN PELAYANAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan dan pembentukan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal	
Indikator		Target
1	Laporan Analisa Jabatan dan Beban Kerja	1 Dokumen
2	Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen
3	Laporan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen
4	Laporan Pembentukan Jabatan Fungsional	1 Dokumen
SUBBAGIAN TATA LAKSANA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penataan proses bisnis serta penyusunan standardisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	
Indikator		Target
1	Laporan Peta Proses Bisnis	1 Dokumen
2	Laporan Penyusunan Standardisasi dan Evaluasi Prosedur, Norma, dan Standar Kerja	3 Dokumen

ESKELON I		
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		Target
1	Indeks Tata Kelola Pengabdian	Predikat "baik"
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7
4	Nilai Sistem Merit	356
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepasuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	
Indikator		Target
1	Indeks kepasuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	
Indikator		Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)

ESKELON II		
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	
Indikator		Target
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,5
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22
3	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11
4	Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	99%
SASARAN KEGIATAN		
S.2	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	
Indikator		Target
1	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80

ESKELON III		
BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan kinerja organisasi, manajemen resiko dan Reformasi Birokrasi	
Indikator		Target
1	Laporan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	4 Dokumen
2	Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Bagian Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen
4	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen

ESKELON IV		
SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penyajian bahan rencana strategis dan rencana program kerja Sekretariat Jenderal dan penyajian rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat serta pengelolaan data kinerja organisasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Jenderal serta pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal	
Indikator		Target
1	Laporan Kinerja Setjen DPR RI	1 Dokumen
2	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
3	Laporan Penyusunan Rencana Strategis Setjen DPR RI	1 Dokumen
4	Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko Setjen DPR RI	1 Dokumen
SUBBAGIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	
Indikator		Target
1	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Bagian Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen
3	Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen

ESKELON I		
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	
Indikator		Target
1	Indeks Tata Kelola Pengabdian	Predikat "baik"
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
3	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7
4	Nilai Sistem Merit	356
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terpenuhinya kepasuhan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	
Indikator		Target
1	Indeks kepasuhan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	
Indikator		Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)

ESKELON II		
BIRO KEUANGAN		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Keuangan Biro Keuangan	
Indikator		Target
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
2	Indeks Pengelolaan Aset	3,7
3	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan	3,7
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
5	Persentase Realisasi Anggaran	98%

ESKELON III		
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penataan kas dan pembuluan, verifikasi, dan pengajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai aparatur sipil negara, staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara serta penyusunan laporan keuangan	
Indikator		Target
1	Laporan Pelaksanaan Anggaran Setjen dan Setjen Dewan	24 laporan
2	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	1 laporan
3	Laporan pengelolaan keuangan lainnya	3 laporan
4	Laporan keuangan bulanan	12 laporan
5	Laporan keuangan Triwulan Lembaga	2 laporan
6	Laporan keuangan Semester I, Laporan Keuangan Tahunan Unaudited, dan Laporan Keuangan Tahun Audited	1 laporan
7	Laporan BPK Instat Lembaga, Setjen Dewan, dan Setjen	1 laporan
8	Laporan Tata Usaha Bagian Administrasi Keuangan	12 Dokumen
9	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian	4 Dokumen
BAGIAN PERALANAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya administrasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri	
Indikator		Target
1	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen Dewan	12 laporan
2	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen	12 laporan
3	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri	12 laporan
4	Laporan Tata Usaha Bagian Perjalanan	12 Dokumen
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Perjalanan	4 Dokumen

ESKELON IV		
SUBBAGIAN PERALANAN DINAS DALAM NEGERI DEWAN		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
Indikator		Target
1	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen Dewan	12 laporan
SUBBAGIAN PERALANAN DINAS NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan	
Indikator		Target
1	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen Setjen	12 laporan
2	Laporan Tata Usaha Bagian Perjalanan	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Perjalanan	4 Dokumen
SUBBAGIAN PERALANAN DINAS LUAR NEGERI		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri DPR RI dan Setjen DPR RI	
Indikator		Target
1	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri	12 Dokumen
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK NEGARA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan barang milik negara serta melaksanakan pembelian dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan DPR RI dan Setjen DPR RI	
Indikator		Target
1	Laporan penatausahaan Barang Milik Negara	12 Dokumen

BAGIAN ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya administrasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan DPR RI dan Setjen DPR RI	
Indikator		Target
1	Laporan penatausahaan Barang Milik Negara	12 Dokumen
2	Laporan Pendistribusian dan Pemeliharaan Barang Milik Negara	1 Dokumen
3	Laporan Barang Milik Negara	12 Dokumen
4	Laporan Tata Usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara	12 Dokumen
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Administrasi Barang Milik Negara	4 Dokumen

SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN PENGUJIAN BARANG MILIK NEGARA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pendistribusian dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan DPR RI dan Setjen	
Indikator		Target
1	Laporan Pendistribusian dan Pemeliharaan Barang Milik Negara	1 Dokumen
SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan DPR RI dan Setjen, serta pelaksanaan tata usaha	
Indikator		Target
1	Laporan Barang Milik Negara	12 Dokumen
2	Laporan Tata Usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara	12 Dokumen
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Administrasi Barang Milik Negara	4 Dokumen

BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA

ESKELON I DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
	Indikator	Target	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "baik"	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
3	Nilai Indeks Pengolahan Asst	3,7	
3	Nilai Sistem Merit	156	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi		
	Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas		
	Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	88 (80,00)	

ESKELON II BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma		
	Indikator	Target	
1	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	
3	Persentase Realisasi Anggaran	99%	

ESKELON III BAGIAN GEDUNG DAN INSTALASI			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan gedung dan pertamanan serta pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Gedung dan Instalasi	1 Dokumen	
2	Perbaikan dan renovasi gedung	303 Dokumen	
3	Perbaikan dan renovasi instalasi	144 Dokumen	
4	Perbaikan dan renovasi gedung pasca Pemilu	303 Dokumen	
5	Laporan Tata Usaha Bagian Gedung dan Instalasi	12 Dokumen	
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Gedung dan Instalasi	4 Dokumen	

ESKELON IV SUBBAGIAN GEDUNG DAN TAMAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan gedung dan pemeliharaan halaman dan taman serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Gedung dan Instalasi		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Gedung	12 Dokumen	
2	Perbaikan dan renovasi gedung	303 Dokumen	
3	Perbaikan dan renovasi gedung pasca Pemilu	303 Dokumen	
4	Laporan Tata Usaha Bagian Gedung dan Instalasi	12 Dokumen	
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Gedung dan Instalasi	4 Dokumen	

SUBBAGIAN ELEKTRIKAL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengoperasian listrik		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Instalasi Listrik	12 Dokumen	
2	Perbaikan dan renovasi instalasi listrik	72 Dokumen	

SUBBAGIAN MEKANIKAL			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan Gedung dan pertamanan serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan dan Perbaikan instalasi Mekanikal	12 Dokumen	
2	Perbaikan dan renovasi instalasi mekanikal	72 Dokumen	

BAGIAN PENGELOLAAN RUMAH JABATAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Rumah Jabatan	1 Dokumen	
2	Perbaikan dan Renovasi Rumah Jabatan	297 Dokumen	
3	Perbaikan dan renovasi Rumah Jabatan pasca Pemilu	15 Dokumen	
4	Laporan Tata Usaha Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	12 Dokumen	
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	4 Dokumen	

SUBBAGIAN PENGELOLAAN RI ANGGOTA KALIBATA			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan rumah jabatan Anggota DPR RI di kawasan Kalibata		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata	12 Dokumen	
2	Perbaikan dan Renovasi Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata	12 Dokumen	
3	Perbaikan dan renovasi Rumah Jabatan pasca Pemilu Anggota DPR RI Kalibata	12 Dokumen	

SUBBAGIAN PENGELOLAAN RI PIMPINAN DAN RI ANGGOTA ULUJAMI			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan rumah jabatan Pimpinan DPR RI, Rumah Jabatan Anggota DPR RI di kawasan Ulujami, dan pelaksanaan tata usaha bagian pengelolaan rumah jabatan		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami	12 Dokumen	
2	Perbaikan dan Renovasi Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami	12 Dokumen	
3	Perbaikan dan renovasi Rumah Jabatan pasca Pemilu Anggota DPR RI Ulujami	12 Dokumen	
4	Laporan Tata Usaha Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	12 Dokumen	
5	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	4 Dokumen	

SUBBAGIAN PELAYANAN WISMA			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pelayanan kerumah tanggungan wisma DPR RI yang meliputi bungalo, ruang idarigam dan gedung serbaguna dan pelaksanaan tata usaha bagian pelayanan wisma DPR		
	Indikator	Target	
1	Pemeliharaan Wisma	12 Dokumen	
2	Laporan Tata Usaha Bagian Pelayanan Wisma	12 Dokumen	
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pelayanan Wisma	4 Dokumen	

SUBBAGIAN PEMELIHARAAN WISMA			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan rumah jabatan Anggota DPR RI di kawasan Kalibata		
	Indikator	Target	
1	Perbaikan dan Renovasi Wisma	12 Dokumen	

BIRO UMUM

ESKELON I DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI			
SASARAN PROGRAM			
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas		
	Indikator	Target	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "baik"	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
3	Nilai Indeks Pengolahan Asst	3,7	
3	Nilai Sistem Merit	156	
SASARAN PROGRAM			
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi		
	Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35	
SASARAN PROGRAM			
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas		
	Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	88 (80,00)	

ESKELON II BIRO UMUM			
SASARAN KEGIATAN			
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum		
	Indikator	Target	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "baik"	
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35	
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	
4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	99%	

ESKELON III BAGIAN PENGAMANAN DALAM			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rumah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
	Indikator	Target	
1	Layanan Pengamanan Dalam Komplek DPR RI	12 Dokumen	
2	Layanan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota	12 Dokumen	
3	Layanan administrasi dan logistik Pengamanan Dalam	12 Dokumen	
4	Pengadaan peralatan keamanan, pelatihan personel, dan layanan pengamanan dalam lainnya	42 Dokumen	
5	Laporan Tata Usaha Bagian Pengamanan Dalam	12 Dokumen	
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pengamanan Dalam	4 Dokumen	

ESKELON IV SUBBAGIAN PENGAMANAN KOMPLEK DPR RI			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
	Indikator	Target	
1	Layanan Pengamanan Dalam Komplek DPR RI	12 Dokumen	

SUBBAGIAN PENGAMANAN RUMAH JABATAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN WISMA			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pengamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
	Indikator	Target	
1	Layanan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota	12 Dokumen	

SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK PENGAMANAN DALAM			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya administrasi, pengamanan dan pengelolaan logistik pengamanan dalam serta pelaksanaan kegiatan tata usaha bagian Pengamanan Dalam		
	Indikator	Target	
1	Layanan administrasi dan logistik Pengamanan Dalam	12 Dokumen	
2	Pengadaan peralatan keamanan, pelatihan personel, dan layanan pengamanan dalam lainnya	42 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Pengamanan Dalam	12 Dokumen	
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pengamanan Dalam	4 Dokumen	

BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KENDARAAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pelayanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan dan kendaraan dinas		
	Indikator	Target	
1	Layanan Layanan Perlengkapan	12 Dokumen	
2	Laporan Pengadaan PIN Anggota DPR RI Pasca Pemilu	2 Dokumen	
3	Laporan Pengadaan Perlengkapan Perkantoran dan Barang Operasional Lainnya	15 Dokumen	
4	Laporan layanan dan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Laporan	
5	Laporan Tata Usaha Bagian Kendaraan	12 Dokumen	
6	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Kendaraan	4 Dokumen	

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pelayanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan		
	Indikator	Target	
1	Layanan Layanan Perlengkapan	12 Dokumen	
2	Laporan Pengadaan PIN Anggota DPR RI Pasca Pemilu	2 unit	
3	Laporan Pengadaan Perlengkapan Perkantoran dan Barang Operasional Lainnya	15 Dokumen	

SUBBAGIAN KENDARAAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya administrasi layanan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta pelaksanaan kegiatan tata usaha bagian Perleengkapan dan Kendaraan		
	Indikator	Target	
1	Laporan layanan dan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Laporan	
2	Laporan Tata Usaha Bagian Kendaraan	12 Dokumen	
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Kendaraan	4 Dokumen	

BAGIAN LAYANAN KESEHATAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya urusan pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal		
	Indikator	Target	
1	Layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	9 Dokumen	
2	Layanan Call Center	1 Dokumen	
3	Laporan Tata Usaha Bagian Layanan Kesehatan	12 Dokumen	
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Layanan Kesehatan	4 Dokumen	

SUBBAGIAN PELAYANAN MEDIK			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal		
	Indikator	Target	
1	Layanan kesehatan promotif	2 layanan	
2	Layanan kesehatan preventif	1 layanan	
3	Layanan kesehatan kuratif	3 layanan	
4	Layanan kesehatan rehabilitatif	3 layanan	

SUBBAGIAN TATA USAHA LAYANAN KESEHATAN			
SASARAN			
S.1	Terlaksananya kegiatan tata usaha bagian kesehatan		
	Indikator	Target	
1	Layanan Call Center	1 Dokumen	
2	Laporan Tata Usaha Bagian Layanan Kesehatan	12 Dokumen	
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Layanan Kesehatan	4 Dokumen	

ESKELON I	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas
Indikator	Target
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Nilai Indeks Pengalokasian Aset
4	Nilai Sistem Merit
356	
SASARAN PROGRAM	
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi
Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi
3.35	
SASARAN PROGRAM	
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas
Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi
88 (80,00)	

ESKELON II	
BIDANG UMUM	
SASARAN KEGIATAN	
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum
Indikator	Target
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan
2	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum
99%	

ESKELON III	
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	
SASARAN	
S.1	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal.
Indikator	Target
1	Laporan informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa
1	Dokumen
2	Laporan tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ
1	Dokumen
3	Laporan Pengadaan Barang/Jasa
44	Keputusan
4	Pengadaan Perangkat Perangik Data dan Komunikasi
685	Unit
5	Pengadaan Peralatan Perengkapan dan Fasilitas Perkantoran
875	Unit
6	Pengadaan Peralatan Keamanan
214	Unit
7	Pengadaan Peralatan Kesehatan
5	Unit
8	Pengadaan Kendaraan Dinas
4	Unit
9	Laporan Tata Usaha Bagian Pengadaan Barang/Jasa
13	Dokumen
10	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4	Dokumen

ESKELON IV	
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PEMELIKILAN SISTEM INFORMASI BARANG/JASA	
SASARAN	
S.1	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan tata usaha bagian pengadaan barang/jasa
Indikator	Target
1	Laporan Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/jasa
1	Dokumen
2	Laporan tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ
1	Dokumen
3	Laporan Tata Usaha Bagian Pengadaan Barang/Jasa
13	Dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4	Dokumen

SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	
SASARAN	
S.1	Terlaksananya kegiatan pengadaan berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau pembinaan teknis dan kepelatihan/latihan/spesialisasi pengadaan
Indikator	Target
32	Laporan Pengadaan Barang/Jasa
44	Keputusan
2	Pengadaan Perangkat Perangkap Data dan Komunikasi
685	Unit
3	Pengadaan Peralatan Perengkapan dan Fasilitas Perkantoran
875	Unit
4	Pengadaan Peralatan Keamanan
214	Unit
5	Pengadaan Peralatan Kesehatan
5	Unit
6	Pengadaan Kendaraan Dinas
4	Unit

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

ESKELON I		
BADAN KEAHLIAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	
Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,31
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	88 (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian	96

ESKELON II		
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislatif DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	
Indikator	Target	
1	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%
2	Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	3,28
4	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
5	Persentase Realisasi Anggaran	95%

ESKELON III	
-------------	--

ESKELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM		
SASARAN		
S.1	Tersedianya Dukungan Administrasi Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	
Indikator	Target	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	12 dokumen

ESKELON II		
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislatif DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	
Indikator	Target	
1	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%
2	Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28
4	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
5	Persentase Realisasi Anggaran	95%

ESKELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
SASARAN		
S.1	Tersedianya Dukungan Administrasi Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	
Indikator	Target	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	12 dokumen

PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

ESKELON I		
BADAN KEAHLIAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	
Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,31
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	88 (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian	96

ESKELON II		
PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan	
Indikator	Target	
1	Persentase Analisis Referensi / Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2	Persentase Ringkasan / Ulasan / Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%
3	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	3,3
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
5	Persentase Realisasi Anggaran	99%

ESKELON III	
-------------	--

ESKELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA		
SASARAN		
S.1	Tersedianya Dukungan Administrasi Tata Usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	
Indikator	Target	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	12 dokumen

PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

ESKELON I		
BADAN KEAHLIAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	
Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,31
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	88 (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian	96

ESKELON II		
PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Terlaksananya Analisis Subkemit legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislatif, Anggaran, Pengawasan DPR, dan Peran Diplomas serta Kebijakan Pimpinan	
Indikator	Target	
1	Persentase Hasil Analisis Keparlemenan, isu, Sepekan, Info Singkat, Parliamentary Review, Jurnal, Buku, dan Proceeding Seminar yang Dimanfaatkan DPR	100%
2	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan	3,29
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
4	Persentase Realisasi Anggaran	98%

ESKELON III	
-------------	--

ESKELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN		
SASARAN		
S.1	Tersedianya Dukungan Administrasi Tata Usaha Pusat Analisis Keparlemenan	
Indikator	Target	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Analisis Pusat Analisis Keparlemenan	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Analisis Pusat Analisis Keparlemenan	12 dokumen

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

ESKELON I		
BADAN KEAHLIAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	
Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,31
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	88 (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian	96

ESKELON II		
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
Indikator	Target	
1	Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	100%
2	Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
3	Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	100%
4	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang Dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,26
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Persentase Realisasi Anggaran	98%

ESKELON III	
-------------	--

ESKELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG		
SASARAN		
S.1	Tersedianya Dukungan Administrasi Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
Indikator	Target	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Analisis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	12 dokumen

BAGIAN ADMINISTRASI BADAN KEAHLIAN

ESKELON I		
BADAN KEAHLIAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	
Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,31
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	88 (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian	96

ESKELON II	
------------	--

ESKELON III		
BAGIAN ADMINISTRASI BADAN KEAHLIAN		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Terselenggaranya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi	
Indikator	Target	
1	Laporan Koordinasi pengumpulan data	1 dokumen
2	Laporan Koordinasi dengan peratuan tinggi	1 dokumen
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	1 dokumen
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keahlian	4 dokumen
5	Laporan Tata Usaha Badan Keahlian	12 dokumen

ESKELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA BADAN KEAHLIAN		
SASARAN		
S.1	Terselenggaranya dukungan tata usaha Badan Keahlian	
Indikator	Target	
1	Laporan Koordinasi pengumpulan data	1 dokumen
2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keahlian	4 dokumen
3	Laporan Tata Usaha Badan Keahlian	12 dokumen
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN KEAHLIAN		
SASARAN		
Indikator	Target	
1	Laporan Koordinasi dengan peratuan tinggi	1 dokumen
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	1 dokumen

## INSPEKTUR I

ESKELON I	
INSPEKTUR UTAMA	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
<b>Indikator</b>	
1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
4	Tingkat kapabilitas LHKRN
5	Tingkat kapabilitas LHKAN
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektur Utama
96	
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya kualitas Pengendalian Intern di Sekretariat Jenderal DPR RI
<b>Indikator</b>	
1	Skor maturitas SPIP
Level 3	
13,28	
SASARAN PROGRAM	
S.3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
<b>Indikator</b>	
1	Persentase penyelesaian indikator rekomendasi pemeriksaan BPK
90%	
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APP
88%	
SASARAN PROGRAM	
S.4	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektur Utama
<b>Indikator</b>	
1	Nilai Evaluasi APF di Lingkup Inspektur Utama
8.800,00	
2	Tingkat penilaian kapabilitas APP
Level 3	
13,28	

ESKELON II	
INSPEKTUR I	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektori
<b>Indikator</b>	
1	Jumlah Unit Kerja di Lingkup tugas Inspektori I yang Memenuhi Syarat Pengukuran Risiko WBK/Website ke TPA
4 unit	
2	Tingkat kapabilitas LHKRN di Lingkup tugas Inspektori I
100%	
3	Tingkat kapabilitas LHKAN di Lingkup tugas Inspektori I
100%	
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektori I
96	
5	Persentase Realisasi Anggaran Inspektori I
88%	
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkup Tugas Inspektori
<b>Indikator</b>	
1	Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Lingkup Tugas Inspektori I
90%	
2	Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APP di Lingkup Tugas Inspektori I
57%	

## ESKELON III

ESKELON IV	
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORI I	
SASARAN	
S.1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektori I
<b>Indikator</b>	
1	Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektori I
4 Dokumen	
2	Laporan Tata Usaha Inspektori I
12 Dokumen	

## INSPEKTUR II

ESKELON I	
INSPEKTUR UTAMA	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
<b>Indikator</b>	
1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
4	Tingkat kapabilitas LHKRN
5	Tingkat kapabilitas LHKAN
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektur Utama
96	
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya kualitas Pengendalian Intern di Sekretariat Jenderal DPR RI
<b>Indikator</b>	
1	Skor maturitas SPIP
Level 3	
13,28	
SASARAN PROGRAM	
S.3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
<b>Indikator</b>	
1	Persentase penyelesaian indikator rekomendasi pemeriksaan BPK
90%	
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APP
88%	
SASARAN PROGRAM	
S.4	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektur Utama
<b>Indikator</b>	
1	Nilai Evaluasi APF di Lingkup Inspektur Utama
8.800,00	
2	Tingkat penilaian kapabilitas APP
Level 3	
13,28	

ESKELON II	
INSPEKTUR I	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektori
<b>Indikator</b>	
1	Jumlah Unit Kerja di Lingkup tugas Inspektori I yang Memenuhi Syarat Pengukuran Risiko WBK/Website ke TPA
3 unit	
2	Tingkat kapabilitas LHKRN di Lingkup tugas Inspektori I
100%	
3	Tingkat kapabilitas LHKAN di Lingkup tugas Inspektori I
100%	
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektori I
96	
5	Persentase Realisasi Anggaran Inspektori I
88%	
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkup Tugas Inspektori
<b>Indikator</b>	
1	Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Lingkup Tugas Inspektori I
94%	
2	Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APP di Lingkup Tugas Inspektori I
76%	

## ESKELON III

ESKELON IV	
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORI II	
SASARAN	
S.1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektori II
<b>Indikator</b>	
1	Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektori II
4 Dokumen	
2	Laporan Tata Usaha Inspektori II
12 Dokumen	

## BAGIAN ADMINISTRASI INSPEKTORI UTAMA

ESKELON I	
INSPEKTUR UTAMA	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
<b>Indikator</b>	
1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
4	Tingkat kapabilitas LHKRN
5	Tingkat kapabilitas LHKAN
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektur Utama
96	
SASARAN PROGRAM	
S.2	Meningkatnya kualitas Pengendalian Intern di Sekretariat Jenderal DPR RI
<b>Indikator</b>	
1	Skor maturitas SPIP
Level 3	
13,28	
SASARAN PROGRAM	
S.3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
<b>Indikator</b>	
1	Persentase penyelesaian indikator rekomendasi pemeriksaan BPK
90%	
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APP
88%	
SASARAN PROGRAM	
S.4	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektur Utama
<b>Indikator</b>	
1	Nilai Evaluasi APF di Lingkup Inspektur Utama
8.800,00	
2	Tingkat penilaian kapabilitas APP
Level 3	
13,28	

## ESKELON II

ESKELON II	
BAGIAN ADMINISTRASI INSPEKTORI UTAMA	
SASARAN	
S.1	Terselenggaranya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektori Utama, serta tindak lanjut dan pelaporan Inspektori Utama
<b>Indikator</b>	
1	Laporan Koordinasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Dokumen	
2	Laporan Koordinasi Penyelesaian TPHP
1 Dokumen	
3	Laporan Koordinasi Penanganan Kapabilitas APF/SACM dan Maturitas SPIP
1 Dokumen	
4	Laporan PMPRB dan PMPPI
1 Dokumen	
5	Laporan LHKRN/ LHKAN/ Grafik/ WBK/ SMAAP
1 Dokumen	
6	Rencana kegiatan dan Anggaran Inspektori
4 Dokumen	
7	Laporan Tata Usaha Inspektori
12 Dokumen	

ESKELON IV	
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORI UTAMA	
SASARAN	
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha Inspektori utama
<b>Indikator</b>	
1	Laporan Koordinasi Penanganan Kapabilitas APF/SACM dan Maturitas SPIP
1 Dokumen	
2	Laporan PMPRB dan PMPPI
1 Dokumen	
3	Laporan LHKRN/ LHKAN/ Grafik/ WBK/ SMAAP
1 Dokumen	
4	Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektori
4 Dokumen	
5	Laporan Tata Usaha Inspektori
12 Dokumen	
SUB BAGIAN TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN INSPEKTORI	
<b>SASARAN</b>	
S.1	Terlaksananya dukungan tindak lanjut dan pelaporan Inspektori Utama
<b>Indikator</b>	
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2 Dokumen	
2	Laporan Koordinasi Penyelesaian TPHP dan keruangan negara
2 Dokumen	

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF

ESELON I		
SEKRETARIS JENDERAL		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,74
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Target
Indikator		Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Hasil penilaian maturitas SPI	Level 4
5	Hasil penilaian kapabilitas APP	Level 3 (3,3)
6	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WKB	6
7	Hasil Pengawasan Keasrian Lembaga DPR	A (88)
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Target
Indikator		Target
1	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (86,13)
2	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (9,6)

ESELON II		
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Target
Indikator		Target
1	Persentase keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP setiap Satu Tahun	62,5%
2	Persentase Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan	92,5%
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	96
4	Persentase Realisasi Anggaran	98%

ESELON III		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	Target
Indikator		Target
1	Benchmarking Penyelenggaraan Orientasi PPPK	1 Dokumen
2	Akreditasi Pelatihan	1 Dokumen
3	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TI, II	1 Dokumen
4	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2 Dokumen
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1 Dokumen
6	Pelatihan Dasar CPNS	1 Dokumen
7	Diklat Fungsional dan Manajerial	1 Dokumen
8	Tim Penyusunan Kurikulum Penguatan dalam rangka Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	1 Dokumen
9	Tim Teknis Penyusunan Modul Pelatihan Jabatan Fungsional	1 Dokumen

ESELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Target
Indikator		Target
1	Rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan	12 dokumen

ESELON III		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	Target
Indikator		Target
1	Benchmarking Penyelenggaraan Orientasi PPPK	1 Dokumen
2	Akreditasi Pelatihan	1 Dokumen
3	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TI, II	1 Dokumen
4	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2 Dokumen
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1 Dokumen
6	Pelatihan Dasar CPNS	1 Dokumen
7	Diklat Fungsional dan Manajerial	1 Dokumen
8	Tim Penyusunan Kurikulum Penguatan dalam rangka Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	1 Dokumen
9	Tim Teknis Penyusunan Modul Pelatihan Jabatan Fungsional	1 Dokumen

ESELON III		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Target
Indikator		Target
1	Pelatihan Purna Kerja	1 Dokumen
2	Pelatihan Budaya Kerja dan Kerja Sama Tim	1 Dokumen
3	Pelatihan Capacity Building untuk Meningkatkan Kinerja Tim	1 Dokumen
4	Pelatihan Membangun Kerjasama Tim dalam Organisasi	1 Dokumen
5	Pelatihan Penyusunan Policy Brief	1 Dokumen
6	Pelatihan Public Speaking	1 Dokumen
7	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Level 3	1 Dokumen
8	Revisi dan Perubahan	1 Dokumen
9	Diklat (Kursus, Seminar, Pelatihan / Workshop di / Short Course luar Negeri)	1 Dokumen
10	Penyusunan Modul Pelatihan Teknis	1 Dokumen
11	Short Course luar Negeri	1 Dokumen

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

ESELON I		
SEKRETARIS JENDERAL		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,74
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Target
Indikator		Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Hasil penilaian maturitas SPI	Level 3
5	Hasil penilaian kapabilitas APP	Level 3 (3,3)
6	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WKB	6
7	Hasil Pengawasan Keasrian Lembaga DPR	A (88)
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Target
Indikator		Target
1	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (86,13)
2	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (9,6)

ESELON II		
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Target
Indikator		Target
1	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (9,6)
SASARAN PROGRAM		
S.2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi	Target
Indikator		Target
1	Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91%
2	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	96%
3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi	3,32
4	Persentase realisasi Anggaran	98%

ESELON III		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Target
Indikator		Target
1	Rencana kegiatan dan Anggaran Pusat Teknologi Informasi	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	12 dokumen

ESELON IV		
SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Target
Indikator		Target
1	Rencana kegiatan dan Anggaran Pusat Teknologi Informasi	4 dokumen
2	Laporan Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	12 dokumen

ESELON III		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya penyusunan rencana induk teknologi informasi, kebijakan teknis dan standarisasi di bidang tata kelola teknologi informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengolahan data dan analitisnya, serta dukungan teknis operasional penggunaan layanan teknologi informasi	Target
Indikator		Target
1	Laporan Tim Penasihat Satu Data DPR RI	1 Dokumen
2	Laporan Pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi	2 Dokumen
3	Laporan Monitoring Data Center	2 Dokumen
4	Laporan Layanan SPBE	1 Dokumen
5	Laporan Manajemen Keamanan Teknologi Informasi	1 Dokumen

ESELON III		
SASARAN		
S.1	Terlaksananya pengolahan di bidang pengembangan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur teknologi informasi, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus	Target
Indikator		Target
1	Laporan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	17 Dokumen
2	Laporan Pengembangan Sistem Jaringan	3 Dokumen
3	Laporan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	11 Dokumen
4	Laporan Pengembangan dan Pengembangan Aplikasi	13 Dokumen
5	Laporan Pengembangan Data Analitis dan Command Center	1 Dokumen
6	Laporan Colocation Data Center	1 Dokumen
7	Operasional dan Pemeliharaan Data dan Teknologi Informasi	1 Dokumen